

ENEWSLETTER

# PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Agustus I Tahun 2022 No. 37

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



*Dr. Salim*

*Economy Expo*

## *Kepedulian PKS Bangkitkan UMKM dan Ekonomi Kreatif*



# Indonesia Bangsa Besar dan Berbhinneka

Persatuan dan kesatuan hanya akan terwujud jika sebagai bangsa kita merasakan senasib sepenanggungan, saling percaya, satu visi dan satu tujuan. Ia juga bisa terwujud jika bangsa ini merasakan keadilan dan pemerataan kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan.

Indonesia ini bangsa yang besar dalam segala aspeknya. Bangsa besar ini memiliki kemajemukan yang luar biasa. Majemuk sukunya, majemuk budayanya, majemuk agamanya, majemuk bahasanya, banyak golongannya, dll.

Jumlah pulau 17.504 pulau, 270 juta penduduk, 1.128 suku bangsa, 546 bahasa daerah, 6 agama yang diakui dan puluhan aliran kepercayaan. Dengan kondisi demikian, kemampuan dalam mengelola

kemajemukan adalah kunci.

Konon salah satu sebab bangsa ini dijajah sampai ratusan tahun karena ketidakmampuan kita dalam mengelola kemajemukan pada masa itu. Tidak mudah menyatukan bangsa Indonesia. Dulunya negeri ini terdiri dari berbagai wilayah dengan ikatan kedaerahan atau primordialitas yang kuat. Maka penjajah sampai akhir usaha mereka selalu menginginkan Indonesia terpecah-pecah dalam wilayah,

kesukuan, dan kedaerahan.

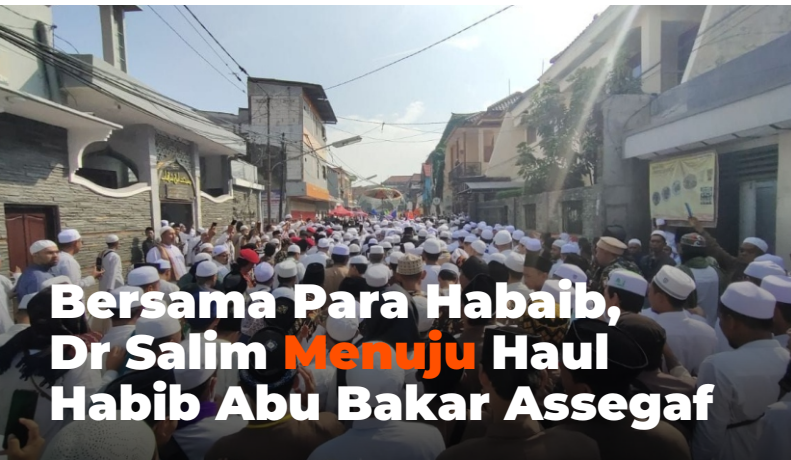
Ketika akhirnya Indonesia merdeka, hal itu tak lain dan tak bukan karena para pejuang dan pendiri bangsa ini mampu menghadirkan persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Itulah modalitas kebangsaan yang mestinya kita warisi hingga sekarang. Untuk mewujudkan modalitas itu entu tidak mudah. Persatuan dan kesatuan hanya akan terwujud jika sebagai

bangsa kita merasakan senasib sepenanggungan, saling percaya, satu visi dan satu tujuan. Ia juga bisa terwujud jika bangsa ini merasakan keadilan dan pemerataan kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan.

Begitulah cara kita mengukur dan mengevaluasi kondisi kebangsaan yang kita hadapi. Tentu kita semua tidak ingin bangsa kita jatuh kembali dalam keterpurukan seperti zaman penjajahan karena

hilangnya persatuan dan kesatuan. Kita ingin bangsa ini maju, berkarakter, bermartabat, adil, dan sejahtera.

Sekarang saatnya bagi kita untuk mengisi kemerdekaan dengan kontribusi sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita masing-masing. Kita satukan pemikiran, gagasan, tenaga, dan karya untuk Indonesia yang kita banggakan. Seluruh ikhtiar anak bangsa yang ingin memajukan bangsa ini harus kita dukung penuh.



## Bersama Para Habaib, Dr Salim Menuju Haul Habib Abu Bakar Assegaf

Gresik (16/07) — Peringatan Haul Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf tahun ini terasa berbeda. Setelah dua tahun vakum, kegiatan ini sangat meriah. Habib Dr Salim Segaf Al Jufri, Ketua Majelis Syuro PKS turut hadir membersamai para habaib.

Kegiatan yang digelar Sabtu, 16 Juli 2022 di Masjid Agung Gresik ini dihadiri ribuan jemaah. Semua tampak antusias, berdesak-desakan mendekati para habaib.

Dr Salim bersama rombongan Habaib berjalan dari

kediaman Habib Abu Bakar bin Ummar Assegaf di jalan KH Zubair menuju ke Masjid Agung Gresik, tempat pelaksanaan Haul Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf.

Jaraknya sebenarnya tidak jauh, tak sampai satu kilometer.

Hanya sekitar 650 meter. Namun, ribuan jemaah yang yang memenuhi jalan, membuat perjalanan lebih lama dari biasanya.

Di setiap jalan, jemaah menyapa dan memanggil. Mengacungkan kamera untuk mengabadikan para cucu Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi wa sallam yang sedang melintas.

Beberapa berteriak, "Ahlana wa sahlana ya habibi, para cucu nabi."

Tak jarang yang berteriak, "Shollu 'ala nabii," yang kemudian disambut bacaan sholawat secara serentak.

Meski gerah dan panas,



Majelis ini dihadiri para habaib dan ulama dan juga mendatangkan ribuan pengunjung untuk mengikuti pembacaan kitab dari para habaib dan ulama yang hadir.

tak mengurangi semangat para jemaah ini mengantarkan para habaib menuju Masjid Agung Gresik.

Saat ada drone datang mendekat, hembusan angin dari baling-baling drone mengundang komentar.

"Alhamdulillah enaknya anginnya. Di sini aja wes, biar ndak sumuk," kata Prapto, seorang pengunjung.

Selain menghadiri Haul Abu Bakar bin Muhammad Assegaf ini, Dr Salim juga menghadiri kegiatan Majelis Rauhaah sehari sebelum kegiatan haul.

Majelis ini dihadiri para habaib dan ulama dan juga mendatangkan ribuan pengunjung untuk mengikuti pembacaan kitab dari para habaib dan ulama yang hadir.

# Dr. Salim: Salim Economy Expo Bentuk Kepedulian PKS untuk Bangkitkan UMKM dan Ekonomi Kreatif

## KUTIPAN

Bandung (24/07) --- Ketua Majelis Syura PKS, Dr. Salim Segaf Aljufri meresmikan Salim Economy Expo di Bale Rame Soreang Bandung Jawa Barat (Minggu, 25/7/2022).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program 'Dr. Salim Menyapa Indonesia' di Provinsi Jawa Barat. Expo UMKM dan ekraf ini disambut antusias ribuan warga Bandung yang memadati lokasi acara.

Menurut Dr. Salim, PKS ingin menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat melalui kebangkitan UMKM dan Ekonomi Kreatif. Untuk itulah Salim Economy Expo ini digelar, bukan hanya di Jawa Barat, tapi juga diberbagai provinsi di seluruh Indonesia.

Menteri Sosial RI 2009-2014 ini bersama PKS terus berkeliling Indonesia mengangkat tema-tema kerakyatan dan kebangsaan serta bertemu dengan pelaku

UMKM dan ekonomi kreatif, petani, peternak, nelayan, serta tokoh-tokoh lintas agama, budaya, dan profesi.

"UMKM seluruh Indonesia berdasarkan data ada 64 juta jumlahnya. Itu artinya potensi kemandirian rakyat sangat besar. PKS berusaha memperluas ruang dan peluang agar UMKM terus berkembang. Maka PKS membuat pusat-pusat inkubasi wirausaha yang dibina Bidang Pemberdayaan Jaringan Ekonomi dan Usaha," ungkap Dr. Salim.

Menurut Dr. Salim di era digital dan ekonomi kreatif saat ini, UMKM sangat mungkin ditingkatkan skala usahanya dengan cepat memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jaringan

pemasaran dan distribusi sehingga omzet dan penghasilannya makin besar.

"Kita serius menggarap sektor UMKM dan ekonomi kreatif rakyat terutama menasar anak-anak muda kita. Komposisi usia produktif Indonesia saat ini 191 juta an dan 53 persennya atau 100 juta an adalah generasi milenial dan generasi Z. Mereka sedang giat-giatnya membangun usaha dan bekerja. Kalau mereka kita bangkitkan semangat wirausahanya pasti dahsyat dampaknya bagi ekonomi nasional," ungkap Dr. Salim.

Indonesia, lanjut Dr. Salim, punya peluang besar bonus demografi di 2035. Peluang tersebut harus ditangkap serius dengan program-program kewirausahaan yang riil dan konkrit. Apalagi rasio kewirausahaan Indonesia saat ini baru 3,47 persen saja relatif rendah dibandingkan Thailand 4,26 persen, Malaysia 4,74 persen, dan Singapura 8,76 persen. Indonesia harus bisa mengejar ketertinggalan minimal terkecil di kawasan Asia Tenggara.



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syura PKS

**"UMKM seluruh Indonesia berdasarkan data ada 64 juta jumlahnya. Itu artinya potensi kemandirian rakyat sangat besar. PKS berusaha memperluas ruang dan peluang agar UMKM terus berkembang."**

"Ini tantangan bagi kita bersama khususnya Pemerintah untuk menumbuhkan wirausaha rakyat melalui pelatihan, pendampingan, kemudahan akses permodalan dan pembinaan secara kontinyu," terangnya. Menurut Dr. Salim tidak ada kemajuan

tanpa kemandirian. Dan tidak ada kemandirian tanpa tumbuhnya kewirausahaan.

"Inilah makna berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, sebagaimana didengungkan Presiden Soekarno dahulu," pungkasnya.



Kunjungi Pesantren  
Addahlaaniyah

## Dr. Salim: Negara Harus Berikan Kontribusi pada Pesantren

KUTIPAN

Soreang (23/07) -- Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Habib Salim Segaf Al Jufri saat bersilaturahmi dengan Pimpinan pondok pesantren Addahlaaniyah Ahmad Salim Apip menyampaikan bahwa negara harus memberikan kontribusi kepada Pesantren.

Dalam kesempatan tersebut mendampingi Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Anggota FPKS DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat Ledia Hanifa dan Diah Nurwitasari. Turut hadir pengurus DPW PKS Jawa Barat dan DPD kabupaten Bandung.

Dr. Salim menyampaikan bahwa pesantren dan negara harus saling mendukung serta memberi kekuatan satu sama lain.

Bagaimana negara memberikan kontribusi maksimal kepada pesantren-pesantren. Agar pada akhirnya muncul tokoh-tokoh dunia

dalam bidang fiqh, hadist dan lainnya" ujar Salim pada Sabtu, (23/07) di Soreang Kabupaten Bandung.

Salim berpandangan pesantren selama ini telah menerapkan metode belajar yang efektif sehingga mampu mendorong santri untuk melakukan yang terbaik. Selain itu, ketika sebuah pesantren memiliki kelebihan dan keunggulan maka akan menjadi pusat rujukan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syuro PKS

"Bagaimana negara memberikan kontribusi maksimal kepada pesantren-pesantren. Agar pada akhirnya muncul tokoh-tokoh dunia dalam bidang fiqh, hadist dan lainnya"



Dialog Kebangsaan  
Lintas Agama,

# Dr. Salim: Seluruh Umat Beragama Berperan Menjaga & Memajukan NKRI

KUTIPAN

Bandung (25/07) --- Partai Keadilan  
Sejahtera (PKS) Jawa Barat menggelar  
acara dialog kebangsaan lintas agama di  
Hotel Savoy Honman Ahad , (24/7/2022).

Hadir memberikan orasi kebangsaan Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri. Turut mendampingi Wakil Ketua Majelis Syura sekaligus Gubernur Jawa Barat 2008-2018 Ahmad Heryawan, dan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.

Acara dialog kebangsaan digelar dalam rangkaian Program Dr. Salim Menyapa Indonesia di Provinsi Jawa Barat.

Tujuannya untuk mengkokohkan semangat kolaborasi diantara elemen bangsa untuk menjawab berbagai permasalahan bangsa dan memajukan Indonesia.

Dr. Salim mengatakan bersyukur bisa bertemu dan berdialog dengan tokoh lintas

agama Jawa Barat sehingga bukan hanya saling memahami, saling bertoleransi, tapi juga mencari titik temu.

Salim berharap PKS bisa terus menjalin silaturahmi terutama dengan tokoh lintas agama karena seluruh umat agama punya peran kebangsaan yang sama dalam menjaga dan memajukan Indonesia.

Sementara itu, tokoh lintas agama yang hadir dari Bandung Raya perwakilan FKUB, MUI, Tokoh Budha Tridarma, Tokoh Hindu, Tokoh Protestan, Tokoh Katolik, Komunitas Tionghoa, Tokoh Pembauran Indonesia, Vox Point Bandung, dan Kesbangpol Bandung.

Hampir semua yang hadir

memberikan pernyataan dan testimoni betapa mereka tersentuh dengan kebijakan dan toleransi konkrit yang ditampilkan almarhum Oded M. Dahnil (Walkot asal PKS) semasa menjadi Walikota Bandung. Mereka juga mengapresiasi upaya PKS yang terus mereka persatukan lintas agama melalui dialog tersebut.

Dr. Salim dalam mengatakan, "Bangsa Indonesia Allah anugerahkan kekayaan alam yang luar biasa. Bangsa yang kaya ini juga diberi anugerah kemajemukan. Maka saya melihat kalau kita bisa bersatu, selalu mencari titik temu, siap bekerja sama dan berkolaborasi Indonesia akan cepat maju bahkan bisa berperan di tingkat global dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi," ungkapnya.

Menteri Sosial RI periode 2009-2014 ini menilai dialog lintas agama perlu sering dilakukan dengan ketulusan dan ditunjukkan dalam sikap keteladanan.

"Saya dengar tadi banyak testimoni almarhum Mang Oded, kader PKS, ketika menjadi Walikota Bandung kerap mengundang perwakilan umat beragama sehari sebelum hari besar agama untuk merayakan di balai kota. Keteladanan seperti ini yang kita perlukan," ungkap Dr. Salim.

Selengkapnya kunjungi  
fraksi.pks.id



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syura PKS

"Begitu seseorang menjadi pemimpin, Dia harus pandai mengambil hati rakyat dan memenuhi hak-hak rakyat. Insya Allah jika PKS ditakdirkan memimpin negeri ini apakah di level kota/ kabupaten, provinsi, atau nasional, maka hak-hak umat beragama akan dijamin dan dimuliakan





## **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

*Kreatif, Atraktif, Substantif*

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

# Jazuli Juwaini: PKS Terbuka Bagi Seluruh Rakyat Papua, Ajak Berjuang Bangun Tanah Papua dalam Bingkai NKRI

## KUTIPAN

PKS terus mengajak seluruh elemen bangsa dan masyarakat untuk berkolaborasi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Sorong (18/07) — Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menghadiri acara Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kota/Kabupaten Sorong di Sorong Papua Barat, Ahad (17/07/2022).

Hadir dalam kesempatan tersebut seluruh kader PKS Kota/Kabupaten Sorong dan sejumlah tokoh Kota/Kabupaten Sorong Papua Barat. Jazuli didampingi Wakil Ketua DPP Bidang Kepemudaan Yanuar Arif Wibowo.

Dalam sambutannya Jazuli Juwaini mengatakan bahwa tanah Papua adalah bagian dari

anugerah Tuhan untuk Indonesia, sepenggal surga yang dicipta Tuhan dengan keindahan dan kekayaan alamnya. Kekayaan itu harus dapat didayagunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Papua.

"Untuk itulah PKS hadir di tengah-tengah masyarakat Papua dan Papua Barat khususnya di Kota dan Kabupaten Sorong. PKS ingin menjadi bagian masyarakat Papua yang bersama-sama berjuang meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat berdaya di wilayah paling timur Indonesia ini," ujar

Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini memastikan bahwa PKS bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia apapun latar suku, budaya, agama dan status sosialnya. Untuk itu, PKS terus mengajak seluruh elemen bangsa dan masyarakat untuk berkolaborasi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

"Siapapun warga Kota dan Kabupaten Sorong khususnya dan masyarakat di seluruh penjuru tanah Papua silakan masuk PKS dan memanfaatkan partai ini untuk membangun bumi pertiwi khususnya untuk membangun tanah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkaskan Jazuli.



**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Siapapun warga Kota dan Kabupaten Sorong khususnya dan masyarakat di seluruh penjuru tanah Papua silakan masuk PKS dan memanfaatkan partai ini untuk membangun bumi pertiwi khususnya untuk membangun tanah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia"



# 10 Tewas Ditembak KKB, FPKS DPR **Kecam** dan Minta Pemerintah Serious Tangani Papua

## KUTIPAN

Jakarta (18/07) — KKB menembaki 12 warga Kampung Nogolait, Nduga, Papua. Sebanyak 10 orang warga tewas pada Sabtu (16/7). Anggota DPR RI Sukamta menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya korban jiwa dari penembakan KKB.

"Kami Fraksi PKS DPR RI turut berduka cita atas meninggalnya rakyat akibat penembakan brutal KKB Papua Merdeka. Kami mengancam tindakan KKB Papua Merdeka dan meminta tindakan ini harus segera dihentikan karena masyarakat sipil yang tidak bersalah. Selain itu, TNI Polri harus segera memberantas KKB ini agar tidak semakin meluas dan meresahkan masyarakat," jelas Sukamta.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga memberikan masukan kepada TNI-Polri terkait pola penanganan KKB Papua Merdeka.

"Pertama, TNI POLRI juga perlu untuk mengubah pola

pendekatan pemberantasan KKB ini. Jika selama ini cenderung defensif dengan pola melindungi objek vital dan membangun pos-pos pengamanan, sudah saatnya TNI Polri memburu KKB sampai ke sarangnya. Proses penegakan hukum juga harus mengedepankan peran dan keterlibatan masyarakat sipil agar tidak terjadi salah sasaran," tandas Sukamta.

Kedua, menurut Sukamta, perang opini publik juga harus dilakukan oleh TNI-Polri. Saat ini setidaknya ada 9 kelompok teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang beranggotakan sekitar 150

orang. Sedangkan anggota KKB Papua yang bersembunyi atau sedang melakukan opini doktrinasi, penggalangan opini jumlahnya belum terpetakan. Langkah-langkah pemetaan dan penangan ideologi Papua Merdeka juga harus dilakukan sehingga tidak muncul anggota-anggota baru Papua Merdeka.

Pemerintah harus membentuk opini publik berlandaskan data, fakta kejadian dan situasi kondisi di Papua harus terbuka, jelas dan jujur informasinya agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok Papua Merdeka yang beroperasi dalam penggalangan opini publik.

"Saat ini muncul upaya pembentukan opini bahwa TNI-Polri melakukan pelanggaran HAM di Papua. Informasi-informasi mengenai kejadian-kejadian krusial di Papua harus disampaikan secara terbuka jelas dan transparan agar publik tahu dan percaya bahwa TNI-Polri bertindak sesuai koridor hukum. Pun apabila ada oknum TNI-Polri bertindak diluar koridor penegakan hukum maka harus diproses secara



**H. SUKAMTA, Ph.D**

Anggota Komisi I DPR RI

"TNI POLRI juga perlu untuk mengubah pola pendekatan pemberantasan KKB ini.

Jika selama ini cenderung defensif dengan pola melindungi objek vital dan membangun pos-pos pengamanan, sudah saatnya TNI Polri memburu KKB sampai ke sarangnya. Proses penegakan hukum juga harus mengedepankan peran dan keterlibatan masyarakat sipil agar tidak terjadi salah sasaran

# Terima Usulan Penetapan Hari Anti Islamophobia, Legislator PKS: Ide yang Menarik

## KUTIPAN

Jakarta (07/07) – Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PKS Mardani Ali Sera, menerima aspirasi dari Komunitas Emak/Bunda terkait usulan hari Anti Islamophobia tepat pada tanggal 15 Maret. Usulan ini diprakarsai atas dasar implementasi Islamophobia di Indonesia yang semakin meningkat di lingkungan masyarakat.

"Saya sangat mengapresiasi aspirasi yang disampaikan Ibu-ibu kepada fraksi PKS atas usulannya. Sebab usulan ini bisa menjadi penyalur dari berbagai persoalan yang memecah-belah", ungkap Mardani

Dalam aspirasinya yang diwakili Ibu Wati selaku Koordinator Komunitas, menyampaikan keprihatinan pada kondisi saat ini dengan berbagai kasus, yang mengakibatkan adanya ketakutan dan diskriminasi yang

mengatasnamakan Islam.

"Saat ini banyak kasus yang berlatarbelakang Islam, baru-baru ini kasus tempat hiburan yang mencoreng umat Islam, begitupun dengan kasus yang beragam yang membuat phobia kepada Islam, sehingga usulan kami untuk libur nasional ini bisa terealisasi", ungkap Koordinator Komunitas Emak/Bunda.

Sebelumnya, usulan pembahasan hari libur Nasional 15 Maret sebagai hari Anti Islamophobia sudah sampai ke

beberapa fraksi dan tingkatan.

"Aspirasi ini kami terima, untuk usulan hari Anti Islamophobia sebagai hari libur nasional dasarnya bagus karena ada momentumnya, dan ini usulan simpatik dan Inspiratif. sehingga kami akan sampaikan ke fraksi terlebih dahulu", ujar Mardani.

Anggota komisi II DPR RI ini juga menyampaikan bahwa ide ini mungkin akan ditindaklanjuti dengan pertimbangan dan pembahasan yang lebih seksama.

"Untuk pertimbangan hari libur nasional akan kami tindak lanjut di fraksi terlebih dahulu, karena dalam usulan hari libur nasional akan melalui tahapan dan proses panjang", pungkasnya.



**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Anggota Komisi II DPR RI

"Aspirasi ini kami terima, untuk usulan hari Anti Islamophobia sebagai hari libur nasional dasarnya bagus karena ada momentumnya, dan ini usulan simpatik dan Inspiratif. sehingga kami akan sampaikan ke fraksi terlebih dahulu",

# Hadiri Pembekalan Anti-korupsi, Habib Aboe: Sejak 2007 PKS Punya **Aturan Internal Soal Korupsi**

## KUTIPAN

Jakarta (19/07) — Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboebakar Alhabsy saat memberikan sambutan pada Pembekalan Antikorupsi bagi Pengurus Partai mengatakan sejak tahun 2007 PKS sudah memiliki aturan internal soal korupsi.

"Saya mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh KPK dengan program Pembekalan Anti Korupsi Bagi Pengurus Partai adalah salah satu ikhtiar dalam upaya pencegahan korupsi pada sektor politik," ungkap pria yang akrab disapa Habib Aboe di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, (19/07).

Ikhtiar yang dilakukan oleh KPK seperti hari ini, imbuh Habib Aboe, sebenarnya juga telah diupayakan oleh PKS sejak tahun 2007.

"Sebagai upaya menumbuhkan iklim politik yang bersih dan bermartabat, pada 7 November 2007, Dewan Syariah PKS mengeluarkan panduan

nomor NOMOR : 14/B/K/DSP-PKS/1428 tentang pedoman perilaku keuangan untuk kader PKS," ujar Anggota Komisi III DPR RI ini

Pada poin ketujuh dalam pedoman tersebut, lanjutnya, setiap Anggota PKS juga diingatkan agar dalam mengelola harta lembaga atau publik wajib melakukannya secara amanah, jujur dan akuntabel.

"Sejak awal DSP sudah memberikan rambu rambu kepada anggota PKS yang menjadi pejabat publik agar memegang amanah dengan baik," tegas Anggota DPR asal Dapil Kalsel I ini.

Kemudian pada poin

kesepuluh, katanya, juga ditegaskan bahwa Setiap anggota partai wajib menolak dana dan fasilitas yang jelas haram dengan cara yang hikmah.

"Ini adalah bagian dari komitmen keluarga besar Partai Keadilan sejahtera untuk menerima anggaran dan fasilitas yang tidak jelas," pungkasnya.

Panduan tersebut, ujarnya, merupakan bentuk komitmen yang mengatur bagaimana perilaku bersih anggota PKS dalam hal keuangan dan kekayaan.

"Misalkan saja pada poin dua panduan tersebut, Diatur bahwa Setiap anggota partai dalam menerima dana, wajib memastikan terpenuhinya 3-A, yaitu Aman syar`i, Aman yuridis dan Aman citra. Artinya, ketika menerima dana, setiap anggota PKS harus memastikan bahwa uang tersebut halal, legal dan bermartabat," papar Bendahara Fraksi PKS DPR RI ini.

Selengkapnya kunjungqgi fraksi.pks.id



**HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI**

Sekjen DPP PKS

"Saya sampaikan terima kasih kepada KPK yang sudah menyelenggarakan Pembekalan Anti Korupsi bagi Pengurus Partai, tentunya kegiatan ini menjadi sarana untuk PKS merefresh kembali komitmen kepartaian yang telah digariskan sejak tahun 2007,"





# Legislator : Pemecatan Brotoseno Tanda Polri tak Lindungi Anggotanya

## KUTIPAN

Jakarta (16/07) --- Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai tepat langkah Polri yang memecat AKBP Raden Brotoseno. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan tanda bahwa Polri tak melindungi anggotanya yang sudah melanggar hukum.

"Putusan itu sekaligus menggugurkan tuduhan bahwa Polri menjadi surga bagi aparatnya yang telah divonis bersalah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," ujar Nasir lewat pesan singkat, Kamis (14/7).

Keputusan pemecatan AKBP Raden Brotoseno dari keanggotaan Polri sudah final. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Humas Mabes Polri, Komisaris Besar Nurul Azizah mengatakan, saat ini, bidang sumber daya di markas besar cuma tinggal menunggu penerbitan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap mantan Kepala Unit-III Subdit-III

Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri itu.

"Kita tunggu saja surat keputusannya. Karena dari sidang Peninjauan Kembali (PK) KEPP (Komisi Etik dan Profesi Polri) sudah memutuskan untuk PDTH (pemberhentian dengan tidak hormat atau dipecat) terhadap yang bersangkutan," kata Nurul di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/7).

Nurul menjelaskan, sidang PK KEPP sudah digelar pada Jumat (8/7/2022). Sidang internal tersebut menghasilkan keputusan pemberatan sanksi administratif terhadap Brotoseno.

Putusan itu tertuang dalam surat PUT/K/PK/1/VII tahun 2022 yang intinya

menganulir seluruh putusan sidang komisi KEPP PIT/72/XI/20 tahun 2020 yang menghukum AKBP Brotoseno berupa demosi dan permintaan maaf karena melakukan perbuatan tercela.

"Putusan PK KEPP memberatkan putusan sebelumnya, berupa PDTH sebagai anggota Polri," kata Nurul.



**H.M. NASIR DJAMIL, M.Si**

Anggota Komisi III DPR RI

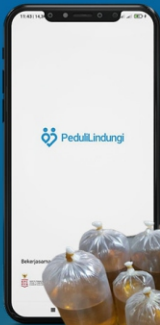


Putusan itu sekaligus menggugurkan tuduhan bahwa Polri menjadi surga bagi aparatnya yang telah divonis bersalah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap



# Minyak curah dan BBM dibatasi pakai aplikasi PKS: Pemerintah tidak memecahkan akar masalah

- Senin, 27 Juni 2022, Pemerintah melakukan uji coba pembelian **Minyak Curah** dengan menggunakan aplikasi **Peduli Lindungi**.



- Jumat, 1 Juli 2022, Pemerintah melalui Pertamina juga akan melakukan uji coba pembelian **Pertalite dan Solar** menggunakan aplikasi **MyPertamina** pada jenis kendaraan tertentu di 11 wilayah.



## Potensi masalah:

1. Jaringan internet di lokasi
2. Akses masyarakat yang membutuhkan gadget masih belum merata
3. Menyulitkan rakyat, tidak efektif batasi kebocoran subsidi

“ Peduli Lindungi hanya mempersulit masyarakat saja. Seharusnya yang dilakukan pemerintah ialah pembenahan pada tingkat produsen dan distributor migor curah karena bagaimanapun selagi kendala tersebut belum teratasi, maka harga minyak goreng akan terus mengalami kenaikan

**Dr. H. Mulyanto, M.Eng.**  
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS





# Hermanto Fasilitasi Bimtek Untuk Pembudidaya Ikan Intensif di Dapil

## KUTIPAN

Padang (09/07) — Anggota DPR dari Fraksi PKS Dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya ke daerah pemilihan memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis (bimtek) untuk pembudidaya ikan.

Para pembudidaya ikan tersebut sebelumnya telah menerima bantuan pemerintah berupa Bioflok, sistem budidaya ikan secara intensif.

"Negara terus berupaya mensejahterakan masyarakat, kali ini pembudidaya ikan. Negara tidak hanya memberikan bantuan Bioflok tetapi juga pembekalan ilmu agar Bioflok tersebut dapat dikelola dengan baik secara berkelanjutan," papar Hermanto dalam sambutannya saat membuka secara resmi kegiatan Bimtek Budidaya Ikan dengan Sistem Bioflok di Pokdaman Gawan Saiyo, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota

Solok, belum lama ini.

Menurut Hermanto, kegiatan Bioflok ini membuka lapangan kerja bagi para anggota kelompok pembudidaya ikan. "Modalnya sudah ditanggung oleh negara," ujar legislator dari FPKS DPR RI ini. Modal tersebut berupa 6 kolam terpal berdiameter 4 meter, pompa air, torn penampung air berikut sistem pipanya, 24 ribu benih ikan dan pakannya untuk satu kali panen.

"Semua itu diserahkan pengelolaannya kepada kelompok. Sebagian hasil dari penjualan ikan silahkan diambil. Sebagian lagi gunakan untuk modal kerja berikutnya.

Demikian seterusnya," papar Hermanto.

"Negara berharap kegiatan ini terus berlanjut agar kesejahteraan pembudidaya ikan meningkat secara bertahap," pungkas legislator dari Komisi IV DPR RI ini.

Kegiatan Bimtek diikuti oleh perwakilan pembudidaya ikan dari Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut Walikota Solok Zul Elfian, Kepala Dinas Pertanian Kota Solok Ikhsan Marosa, Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam Ikhsan Kamil dan 2 tokoh masyarakat setempat Yohendri Datuk Marajo dan Indra.



**Dr. HERMANTO, S.E., M.M**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

"Negara terus berupaya mensejahterakan masyarakat, kali ini pembudidaya ikan. Negara tidak hanya memberikan bantuan Bioflok tetapi juga pembekalan ilmu agar Bioflok tersebut dapat dikelola dengan baik secara berkelanjutan"





# Anggota FPKS Pertanyakan Ketegasan Pemerintah dalam Menghadapi Ancaman Krisis Pangan

## KUTIPAN

Jakarta (07/07) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai bahwa pemerintah sampai saat ini belum serius menghadapi ancaman krisis pangan yang terjadi di Indonesia.

Hal ini disampaikan Johan dalam keterangannya ketika menghadiri sesi PKS Legislative Report (PLR) di acara Rapat Paripurna DPR RI Ke-28 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada Kamis (07/07).

Dalam penjelasannya, Johan menilai bahwa sejumlah negara yang saat ini sedang berada pada krisis pangan, sebetulnya tidak akan berpengaruh besar terjadi di Indonesia apabila pemerintah mulai serius dalam mengatasi persoalan ini.

"Apabila Indonesia dikelola dengan benar, kita tidak akan mengalami krisis pangan. Namun, sayangnya yang terjadi sekarang pemerintah belum

menaruh perhatian yang serius kepada penanganan ancaman krisis pangan," terangnya saat diwawancarai dalam PLR.

Lebih lanjut, Johan mengatakan bahwa komposisi anggaran pangan dari tahun ke tahun di beberapa sektor pada nyatanya memang terus mengalami penurunan.

"Meskipun klaim pemerintah naik, akan tetapi faktanya di sektor-sektor riil seperti pertanian, kelautan, dan kehutanan mengalami penurunan yang signifikan. Padahal apabila dikelola secara benar potensi pangan di negara kita ini servikasinya sudah cukup apabila berbicara stock. Karena, permasalahan sekarang adalah pada persoalan distribusi. Sehingga,

saya masih berharap pemerintah memberikan perhatian serius atas warning ancaman krisis pangan dari dunia internasional." Tambahnya.

Anggota Fraksi PKS Dapil NTB I ini juga mengatakan bahwa kita saat ini tidak bisa menyeragamkan Indonesia dengan satu komoditas saja seperti beras, perlu diversifikasi pangan dengan mengembangkan pangan lokal sebagai salah satu bentuk upaya keniscayaan apabila Indonesia tidak mau mengalami ancaman krisis pangan.

Lanjutnya, Johan Rosihan juga menyinggung agenda reses yang nantinya ia lakukan setelah masa penutupan sidang paripurna.

"Tentu saya berusaha untuk menyampaikan informasi dari berbagai program kebijakan, bagaimana dukungan pemerintah, maupun bagaimana regulasi yang ditetapkan terkait persoalan ini," tutupnya.



**H. JOHAN ROSIHAN, S.T.**

Anggota Komisi IV DPR RI

"Meskipun klaim pemerintah naik, akan tetapi faktanya di sektor-sektor riil seperti pertanian, kelautan, dan kehutanan mengalami penurunan yang signifikan. Padahal apabila dikelola secara benar potensi pangan di negara kita ini servikasinya sudah cukup apabila berbicara stock. Karena, permasalahan sekarang adalah pada persoalan distribusi. Sehingga, saya masih berharap pemerintah memberikan perhatian serius atas warning ancaman krisis pangan dari dunia internasional."

# Anggota FPKS Minta Pemerintah **Salurkan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran**

## KUTIPAN

Jakarta (15/07) --- Seiring dengan hasil keputusan Panitia Kerja DPR RI terkait pupuk bersubsidi yang merekomendasikan kepada pemerintah untuk membatasi jenis komoditas yang mendapat pupuk bersubsidi, Anggota DPR RI komisi IV, Andi Akmal Pasluddin menekankan agar pupuk bersubsidi ini tepat sasaran untuk dapat dinikmati oleh petani kecil.

Akmal mengatakan, selama ini, pupuk ini mudah didapatkan, tapi yang sulit adalah, untuk mendapatkan pupuk subsidi. Kondisi ini ia dapatkan dari berbagai serap aspirasi dengan petani baik di daerah pemilihan maupun kunjungan kerja komisi IV di berbagai sentra pertanian di seluruh Indonesia.

"Sekarang tinggal 9 komoditas pupuk yang di subsidi yang tadinya 70 komoditas. Kita semua berharap, ini tepat sasaran dan semakin memudahkan pemerintah untuk efektif dan efisien dalam penyaluran pupuk subsidi", tutur Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menambahkan, setiap kebijakan akan mendapat feedback dari masyarakat. Misalnya, ia mencontohkan, kebanyakan kebutuhan masyarakat mayoritas Urea, NPK, dan SP.

"Sehingga pemerintah bagaimana mensinkronkan kondisi ini dengan berbagai kajian untuk mendukung peningkatan produksi pangan yang berujung memberi kontribusi pada ketahanan pangan suatu daerah bahkan nasional," pungkasnya.

Akmal mengatakan berbagai reaksi dari masyarakat

setelah munculnya kebijakan pembatasan komoditas mesti menjadi masukan bagi DPR dan pemerintah.

"Yang jelas pupuk subsidi itu jangan kurang, yang kedua pada saat dibutuhkan ada barangnya di masyarakat. Yang jadi masalah selama ini barangnya tidak ada," jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Akmal menyesalkan, masih ada masyarakat yang ingin membeli pupuk subsidi maupun non subsidi tetapi barangnya sulit didapat karena terbatas jumlahnya. Ia menjelaskan, bahwa DPR Komisi IV melalui panja Pupuk, ingin tataniaga ataupun mekanisme penyaluran pupuk subsidi maupun non subsidi ada perbaikan.

Selain itu, imbuhnya, bagaimana penyadaran kepada masyarakat agar menggunakan pupuk sesuai dengan keilmuan, yang selama ini dari hasil penelitian menunjukkan bahwa paling banyak digunakan pupuk urea sehingga merusak unsur hara dari tanah kita.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Dr. H. ANDI AKMAL  
PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

"Berbagai reaksi dari masyarakat setelah munculnya kebijakan pembatasan komoditas mesti menjadi masukan bagi DPR dan pemerintah. Yang jelas pupuk subsidi itu jangan kurang, yang kedua pada saat dibutuhkan ada barangnya di masyarakat. Yang jadi masalah selama ini barangnya tidak ada



# Harga Pangan Global Naik, Aleg PKS Minta Pemerintah Jaga Ketahanan Pangan dan Sejahterakan Petani

## KUTIPAN

Jakarta (19/07) — Anggota komisi IV DPR RI asal Fraksi PKS, Slamet meminta pemerintah untuk serius menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani menyusul situasi pergerakan harga pangan dunia saat ini mengalami kenaikan.

"Pemerintah harus segera menyusun rencana strategis dan mitigasi jika tidak ingin keteteran saat menghadapi ancaman kenaikan pangan global," ujarnya di Jakarta Selasa (19/7/2022).

Menurutnya, pergerakan harga pangan global belakangan ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai level yang mengkhawatirkan. Sejumlah peristiwa seperti perang Rusia-Ukraina belum bisa diprediksi kapan berakhirnya dan telah memberikan dampak guncangan ekonomi di seluruh dunia, harga minyak dunia yang terus meningkat serta ancaman resesi di sejumlah negara super power seperti Amerika menjadi

penyebab utama ketidakpastian global termasuk harga pangan.

"Dengan kondisi Indonesia yang masih sangat tergantung dengan ketersediaan pasokan bahan pangan dari luar negeri seperti gandum, kedelai, gula dan beberapa produk hortikultura menuntut kesiapan dari pemerintah melalui koordinasi antar semua stakeholder dalam menghadapi guncangan global saat ini," imbuhnya.

Potensi kenaikan harga pangan global ini diamini oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat menyampaikan pidatonya pada acara High Level Seminar G20 Indonesia 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali. Ia menyampaikan bahwa harga

pangan global telah menyentuh angka 13 persen pada bulan maret lalu dan diprediksi akan terus mengalami peningkatan sampai lebih dari 20 persen pada akhir tahun 2022.

Sudah saatnya, lanjut Slamet, Pemerintah berani mengambil langkah strategis dengan menghentikan semua proyek yang menyedot anggaran besar seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek-proyek infrastruktur lain yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan penyediaan pangan.

Selain itu Slamet juga meminta Presiden mengevaluasi proyek food estate agar tepat sasaran dan dapat mendukung ketahanan pangan nasional.

"Di sisi yang lain Pemerintah juga harus memberikan jaminan bagi kesejahteraan petani, mulai dari perubahan skema subsidi, perlindungan produksi untuk menjamin peningkatan produktivitas pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan pangan Nasional," tutup Slamet.



**drh. H. SLAMET**

Anggota Komisi IV DPR RI

“Dengan kondisi Indonesia yang masih sangat tergantung dengan ketersediaan pasokan bahan pangan dari luar negeri seperti gandum, kedelai, gula dan beberapa produk hortikultura menuntut kesiapan dari pemerintah melalui koordinasi antar semua stakeholder dalam menghadapi guncangan global saat ini”



# LRT Jabodebek Beban KAI, Aleg PKS: **Jangan Jadi Alasan Naikkan Tarif Commuter Line**

**KUTIPAN**

Tasikmalaya (09/07) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Toriq Hidayat, sangat menyayangkan jika pembangunan LRT Jabodebek yang masuk ke dalam proyek strategis nasional ini menyimpan masalah.

Hal ini terkuak saat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia/KA menyebutkan mengenai proyek ini yang menjadi beban perseroan. "Dalam RDP dengan Kami, Rabu kemarin (6/7/2022), Pimpinan KAI mengatakan pembangunan LRT Jabodebek diinisiasi oleh salah satu kontraktor BUMN dan Kementerian Perhubungan sejak 2015. Dalam perjalanannya di 2017, kontraktor BUMN tersebut kesulitan menagih ongkos pembangunan kepada pemerintah," ujar Politisi PKS ini sambil menggelengkan kepala. Menurut Bos KAI ini, kata

Toriq Lagi, kesulitan penagihan tersebut diakibatkan karena proyek ini belum terkontrak dengan pemerintah. Sehingga sebagai operator di bidang ini, KAI harus memikul hutang sebesar Rp 20 triliun untuk menyelesaikan pembangunan. Dari perkiraan total sejumlah 29,9 triliun.

"Bisa jadi hal ini yang menyebabkan target operasi LRT Jabodebek mundur. Pada awal tahun, PT KAI masih menargetkan LRT akan beroperasi pada Agustus 2022. Namun Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub lalu menyatakan, LRT baru bisa mulai mengangkut penumpang

sekitar Desember 2022, atau awal 2023. Karena progresnya baru 81,7%5," tuturnya.

Aleg Pusat asal Tasikmalaya juga mencurigai, wacana kenaikan tiket commuter line yang sempat viral beberapa waktu lalu timbul dikarenakan kondisi PT KAI yang harus menyelesaikan kewajibannya atas proyek LRT Jabodebek tersebut.

"Jika wacana menaikkan harga tiket commuter line beberapa waktu lalu akibat imbas proyek LRT Jabodebek yang membebani keuangan KAI. Menurut saya, hal ini tidak benar. Pemerintah yang harus menyelesaikan kewajiban ini, bukan masyarakat," tegasnya. "Mudah-mudahan dugaan ini salah," tambah Toriq mengakhiri.

**KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi V DPR RI

"Jika wacana menaikkan harga tiket commuter line beberapa waktu lalu akibat imbas proyek LRT Jabodebek yang membebani keuangan KAI. Menurut saya, hal ini tidak benar. Pemerintah yang harus menyelesaikan kewajiban ini, bukan masyarakat, Mudah-mudahan dugaan ini salah"

## Proyek LRT Jabodetabek Menuai Kontroversi

# Aleg PKS: Sudah Bermasalah Sejak Awal

### KUTIPAN

Jakarta (11/07) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryadi Jaya Purnama, menyampaikan pendapatnya terkait proyek LRT Jabodetabek yang menemukan banyak kejanggalan

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Dirut PT. KAI, Didiek Hartantyo, Rabu silam (06/07).

"Proyek ini sangat tidak wajar karena melibatkan PT. KAI dalam melakukan pembayaran proses pembangunan yang dilakukan, padahal sedari awal kami tidak pernah dilibatkan", ujar didiek.

Seperti yang diketahui, proyek pembangunan LRT Jabodetabek telah masuk kedalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dimulai dari tahun 2015 silam melalui Perpres 98/2015. Dalam Perpres tepatnya pasal 2 menerangkan bahwa proyek LRT akan dibebankan pada BUMN tepatnya PT. Adhi Karya Tbk dengan tahapan pelaksanaannya dituangkan dalam perjanjian

antara Kementerian Perhubungan (Kemenuh) dengan PT. Adhi Karya Tbk dengan harga perkiraan, spesifikasi teknis dan pembayaran pengeluaran akan dibebankan pada Kementerian Perhubungan sebagai owner proyek LRT Jabodetabek.

Mirisnya, menjelang 2(dua) tahun keberjalanan proyek tersebut, PT. Adhi Karya Tbk mengalami kesulitan untuk menagih ongkos pembangunan pada pemerintah alhasil, permasalahan mulai terjadi ketika keluarnya peraturan yang mengatakan bahwa dalam pembayaran keberlangsungan prasana proyek LRT Jabodetabek akan dibebankan pada PT. KAI melalui Perpres 49/2017 untuk mengganti Perpres 98/2015.

Menyikapi hal tersebut, Suryadi Jaya Purnama mene-

gaskan bahwa dalam permasalahan ini PT. KAI tidak berhak diikutsertakan dalam melunasi beban utang proyek LRT jabodetabek. Mengingat, imbuh Suryadi, PT. KAI tidak ikut serta dalam menetapkan harga perkiraan, spesifikasi teknis dan konsep pembayaran proyek ini.

"Dari awal kan pemerintah sudah bilang bahwa pengeluaran proyek ini akan dibebankan kepada anggaran Kemenuh, kenapa sekarang jadi terbit Perpres untuk membebankan pembayaran pada PT. KAI? ini sebuah kejanggalan dan ketimpangan regulasi yang dibuat sedari awal proyek ini ditetapkan" ujarnya dengan sangat tegas.

Ia pun menambahkan bahwa selain dari ketimpangan regulasi ia merasa bahwa terdapat kerancuan dalam mengkoordinasi dengan instansi lain yang berkaitan.

"Tentunya, dari permasalahan ini bisa dilihat bahwa pemerintah ragu-ragu dalam menjalankannya jadi, membebankan tanggungan anggaran kepada PT. KAI padahal sangat jelas pemerintah terlihat wanprestasi dari ketentuan Perpres 98/2015 perihal proyek LRT jabodetabek ini" ungkapnya.



**H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.**

Anggota Komisi V DPR RI

**“Proyek ini sangat tidak wajar karena melibatkan PT. KAI dalam melakukan pembayaran proses pembangunan yang dilakukan, padahal sedari awal kami tidak pernah dilibatkan”**

Terakhir dalam menutup pendapatnya dalam RDP bersama Komisi V, ia menurkan solusi yang patut dilakukan yakni dengan mengubah Perpres 49/2017 dengan Perpres baru yang menghilangkan tanggungjawab PT. KAI untuk melunasi pembayaran. Ia pun menerangkan bahwa BPK harus ikut serta dalam menyelidiki proyek ini agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Sudah seharusnya PT. KAI tidak ikut terlibat dalam perma-

salahan ini. Oleh karenanya menurut saya solusinya cukup mengubah Perpres tersebut dengan Perpres baru yang ketentuannya menghapus kewajiban PT. KAI membayar utang proyek LRT Jabodetabek, kalaupun sudah terlanjur membayar saya sangat berharap BPK bisa ikut turut serta dalam menyelidiki proses pembangunan ini dengan harapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada." ungkapnya.

# PROGRAM UNGGULAN

## FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
*Kecatif Atrokrakif Substantif*

**Parlementaria** ( Diskusi Publik,  
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,  
Ruang Aleg dan Internships)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.



# Daripada Wacanakan Kenaikan Harga BBM, Aleg PKS Minta Presiden Segera Revisi Perpres No.191/2014

## KUTIPAN

Jakarta (10/07) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Presiden Joko Widodo sebaiknya segera menerbitkan revisi Perpres No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, daripada sibuk wacanakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Ini adalah pilihan yang paling rasional di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih benar, akibat pandemi Covid-19 serta kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak goreng, dan lainnya," ungkap Mulyanto.

Karena, kata Mulyanto, kenaikan harga BBM bersubsidi sangat sensitif bagi kenaikan inflasi, terutama dari sektor transportasi dan juga dari sektor bahan pangan pokok.

"Selain itu karena ditengarai sekarang ini penyaluran BBM

bersubsidi hampir sebanyak 60 persen tidak tepat sasaran. Belum lagi adanya dugaan kebocoran BBM bersubsidi ke industri dan ekspor ilegal ke negara tetangga," tandasnya.

"Jadi kalau pembatasan dan pengawasan BBM bersubsidi ini dapat dilakukan dengan baik, maka kita bisa menghemat APBN lebih dari 50 persen. Ini kan bagus," imbuh Mulyanto.

Wakil Ketua FPKS DPR RI itu minta Presiden tidak usah membandingkan harga BBM di Indonesia dengan di

negara maju. Namun cukup membandingkannya dengan harga BBM di negeri jiran seperti Brunei dan Malaysia. Harga BBM di negara serumpun seperti Brunei dan Malaysia jauh lebih murah dibanding Indonesia.

"Contoh, harga bensin di Brunei untuk RON 90 sebesar Rp. 3.800,- per liter, dan untuk bensin RON 95 sebesar Rp. 6.900 per liter. Di kita bensin Pertalite (RON 90) dijual dengan harga Rp. 7.650,- per liter. Karenanya kalau Pemerintah peka dan memiliki sense of crisis, maka regulasi terkait pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ini, baik solar maupun pertalite, penting untuk segera ditetapkan. Jangan tertunda-tunda seperti sekarang ini," jelas Pak Mul.

Ibarat argometer, lanjut Mulyanto, beban subsidi yang tidak tepat sasaran, akan jalan terus kalau revisi Perpres dimaksud tidak terbit-terbit. Semakin lama kita menunda pembatasan penggunaan BBM



**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**  
Anggota Komisi VII DPR RI

**"Ibarat argometer beban subsidi yang tidak tepat sasaran, akan jalan terus kalau revisi Perpres dimaksud tidak terbit-terbit. Semakin lama kita menunda pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, maka akan semakin lambat efisiensi anggaran dilakukan."**

bersubsidi, maka akan semakin lambat efisiensi anggaran dilakukan.

Untuk diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Puncak Peringatan Hari Keluar-ga Nasional ke-29 tahun 2022 di Medan, Kamis (7/7/2022) kembali menyinggung tentang

harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini sedang mengalami lonjakan.

Dalam kesempatan tersebut Presiden memberi sinyal tentang kemungkinan adanya kenaikan harga BBM di Indonesia, bila beban APBN terlalu berat.

# Ibadah Haji Pasca Pandemi, Politisi PKS **Beberkan** Sejumlah Catatan Penting untuk Pemerintah

## KUTIPAN

Makkah (08/07) — Setelah penundaan ibadah haji selama 2 tahun terakhir, Penyelenggaraan haji di tahun ini kembali dilaksanakan dengan berbagai penerapan regulasi baru guna mencegah penyebaran covid-19.

Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PKS KH. Bukhori Yusuf, berkesempatan mengikuti dan meninjau pelaksanaan ibadah haji langsung dari kota suci Makkah di tahun ini.

"Secara umum penyelenggaraan ibadah haji di tahun Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar meskipun menyisipkan beberapa catatan untuk perbaikan pelaksanaan haji di tahun yang akan datang" Terangnya

Beliau menuturkan Pelaksanaan ibadah haji di tahun ini terdapat permasalahan salah satunya di beberapa tempat yang kualitas cateringnya sempat dikeluhkan sebagian jemaah dan perlu tinjauan

kembali.

"Di Sebagian tempat terdapat jemaah yang mengeluhkan makanan yang nyaris basi, namun catatan penting lainnya yakni porsi makanan yang di tawarkan dengan harga tender perlu di tinjau kembali" Ujarnya.

Pelaksanaan haji di tahun ini juga diwarnai dengan 4000 Jemaah haji Furoda yang gagal berangkat, menanggapi masalah tersebut. Menanggapi hal tersebut bukhoru menyampaikan persoalan ini harus segera teratasi.

"Visa furoda itu praktisnya tidak ada harganya, karena visa ini diberikan pemerintah Kerajaan Saudi atas

penghargaan ke pihak-pihak tertentu, namun ada oknum yang memanfaatkan, sehingga diperjual belikan. Dikarenakan antrian haji kita yang cukup panjang sampai 30 tahun, maka momen ini dimanfaatkan bagi yang bisa membeli walaupun tawaran harga yang tinggi" Ungkapnya.

Pelaksanaan sistem furoda ini dianggap merugikan calon jemaah yang tidak ada kepastian keberangkatan, sehingga aleg asal dapil Jawa Tengah ini mengusulkan regulasi untuk mengantisipasi tidak terulangnya kejadian yang sama.

"Karena ini berangkat dari ketidakpastian, maka kita buat satu regulasi yang memastikan. Perlu ada satu mekanisme sampai kapan visa itu bisa sampai ke calon jemaah, dan berapa jumlah kuota visa yang pasti. Ini harus di atur dalam mekanisme tertentu, karena dalam undang-undang haji aturan tersebut belum kita rumuskan, dan ini kesempatan kita untuk memperbaiki agar tidak ada lagi korban" Lanjutnya Lagi Langsung dari Arafah,



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Visa furoda itu praktisnya tidak ada harganya, karena visa ini diberikan pemerintah Kerajaan Saudi atas penghargaan ke pihak-pihak tertentu, namun ada oknum yang memanfaatkan, sehingga diperjual belikan. Dikarenakan antrian haji kita yang cukup panjang sampai 30 tahun, maka momen ini dimanfaatkan bagi yang bisa membeli walaupun tawaran harga yang tinggi"

diakhir sesi Bukhori menyampaikan bentuk keseriusannya mendorong dirjen haji untuk segera membentuk mekanisme visa furoda supaya mendapatkan kepastian, dan bisa mem-

berikan advokasi ke semua pihak seperti Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau calon jemaah haji.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dampak Covid-19 dan  
Resesi Ekonomi Global,

## HNW Dorong RUU Bank Makanan Disahkan

KUTIPAN

Jakarta (16/07) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Majelis MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengkhawatirkan dampak dari covid-19 serta eksekusi dari resesi ekonomi global terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat khususnya Indonesia.

Hidayat pun berharap agar DPR dan Pemerintah dapat menghadirkan makin banyak lagi kebijakan untuk atasi masalah tersebut atau paling tidak mengurangi eksekusi-eksekusi negatifnya.

"Antara lain dengan segera membahas dan mengundangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dapat membantu masyarakat rentan, salah satunya adalah RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR," hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam Seminar terkait Bank Makanan yang diselenggarakan

oleh FoodCycle Indonesia di Jakarta, Jumat (15/07/2022).

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa Indonesia harus bersiap terhadap segala kemungkinan dari dampak pandemi covid maupun resesi global tersebut. Apalagi, kondisi perekonomian Indonesia juga cukup terpuak dengan pandemi Covid-19 yang menghasilkan jumlah warga miskin yang semakin banyak.

"Kondisi ini diharapkan dapat terbantu dengan kehadiran RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial yang memang diinisiasi untuk membantu Negara melaksanakan kewajibannya peduli dan membantu

fakir miskin," ungkap pria yang akrab disapa HNW.

Sebagai informasi, bank makanan merupakan organisasi yang dikelola oleh masyarakat yang mengumpulkan makanan layak konsumsi yang berlebih (surplus food) dari restoran, toko retail, hotel, industri makanan dan sebagainya, lalu menyalurkan kepada warga yang membutuhkan.

Kegiatan ini menangani dua persoalan sekaligus, yakni kemubaziran pangan yang juga mengkhawatirkan di Indonesia dan membantu masyarakat rentan terhadap akses makanan.

"Sudah sangat sewajarnya apabila kita mendukung kegiatan bank makanan ini, termasuk dengan kegiatan edukasi kepada masyarakat untuk tidak mubadzir dan bijaksana mengelola makanan, kegiatan aksi sosial, hingga keberpihakan pemerintah atas kegiatan ini, termasuk dari sisi regulasi. Maka sudah seharusnya bila RUU Bank Makanan ini segera dibahas dan disetujui untuk diundangkan," ujarnya.

Lebih lanjut, HNW menjelaskan setidaknya ada beberapa poin penting yang diatur dalam RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial yang diinisiasi oleh HNW sebagai anggota komisi VIII DPRRI yang juga membidangi masalah sosial. Pertama, memberikan payung hukum legalitas dari kegiatan dan lembaga bank makanan.



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Wakil Ketua MPR RI

"Demi kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua Rakyat Indonesia yang memerlukan bantuan pangan, apalagi mereka yang terdampak covid-19 maupun resesi global, sudah sangat seharusnya bila RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial ini segera disepakati dan diundangkan oleh DPR dan Pemerintah"

Karena dalam hal ini masih ada kekosongan hukum. Kedua sebagai upaya untuk mendorong restoran, café, hotel, toko retail untuk tidak membuang makanan layak konsumsi yang mereka miliki

secara percuma. Makanan yang dimaksud adalah makanan berlebih yang masih layak untuk dikonsumsi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



# Anggota FPKS Minta Menag Pangkas Biaya dan Tambah Kuota Haji Indonesia Tahun Depan

## KUTIPAN

Makkah (12/07) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis dalam Pengawasan Ibadah Haji 1443 H berbincang dengan Menteri Agama Republik Indonesia di Arafah 9 Dzulhijah, agar biaya penyelenggaraan Haji tahun depan bisa dipangkas.

"Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun ini 1443 Hijriyah saya nilai cukup sukses, hanya saja ada beberapa hal yang sangat penting dalam evaluasi ibadah haji tahun ini. Temuan pengawas haji Komisi VIII DPR RI, tahun ini masih ditemukan pemondokan yang relatif jauh, padahal banyak gedung bagus yang lebih dekat yang masih kosong tidak disewa Kementerian Agama apalagi jatah haji yang datang cuma setengah jemaah sebelum Covid-19," ujar Iskan.

Iskan menambahkan selanjutnya terkait biaya di Arafah, Mina dan Muzdalifah yang naik 49 % tanpa adanya

fasilitas yang signifikan tentu harus jadi evaluasi.

"Khususnya terkait biaya haji untuk tahun depan atau 1444 H, kita perlu membicarakannya kembali dari jauh-jauh hari dan saya menyampaikan ini pada saat berbincang dengan Pak Menteri Agama di Arafah. Saya berharap supaya usul Biaya Haji tahun depan bisa lebih dipangkas kembali, agar lebih murah ketimbang biaya haji di tahun ini dan saya ingatkan dengan syarat nego jauh-jauh hari serta jangan mendadak," tegas Iskan.

Anggota Legislative asal Sibuhuan ini juga menambahkan bahwa Haji

tahun depan bisa ditingkatkan lagi terkait kuota jamaah haji Indonesia.

"Kemungkinan di tahun depan sesuai dengan yang saya usulkan kepada Pak Menteri Agama, kita memberangkatkan sebanyak 250 ribu Jamaah Haji Indonesia. Dalam kesempatan perbincangan ini juga, saya berharap kedepannya agar Kementerian Agama bisa lebih mempersiapkan khususnya terkait kuota haji yang akan ditambah. Kita dapat menambah kuota untuk keberangkatan haji di tahun depan dengan semaksimal mungkin, harapan kita semua tahun depan sudah normal semuanya khususnya terkait untuk kuota jamaah haji Indonesia. Semoga apa yang kita rencanakan, jauh-jauh hari dapat terealisasikan dengan baik", ungkap Iskan.

Lebih lanjut, Iskan juga menambahkan agar biaya dan kuota haji 1444 Hijriah bisa dibicarakan dalam rapat kerja agar lebih dalam lagi pembahasannya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



## H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Dapil Sumatera Utara II

"Kemungkinan di tahun depan sesuai dengan yang saya usulkan kepada Pak Menteri Agama, kita memberangkatkan sebanyak 250 ribu Jamaah Haji Indonesia. Dalam kesempatan perbincangan ini juga, saya berharap kedepannya agar Kementerian Agama bisa lebih mempersiapkan khususnya terkait kuota haji yang akan ditambah"

# Anggota FPKS Harap Malaysia **Segera Perbaiki** Proses Penerimaan PMI Sesuai MoU

## KUTIPAN

Jakarta (21/07) --- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati berharap pemerintah Malaysia bisa segera memperbaiki pelaksanaan penerimaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai dengan MoU pemerintah Indonesia dan Malaysia agar semua pihak bisa segera mendapatkan manfaat dari kerjasama tersebut.

Pemerintah Indonesia masih menghentikan sementara proses pengiriman PMI dari Indonesia ke Malaysia untuk memperbaiki sistem penerimaan PMI agar sesuai dengan MoU.

Kurniasih menyebut, semangat adanya MoU pengiriman PMI ke Indonesia dan Malaysia adalah perlindungan yang lebih terhadap PMI. Saat moratorium dicabut dan nota kesepahaman kedua negara disepakati setelah sebelumnya kosong beberapa tahun, maka semua

pihak harus menghormati isi MoU dan fokus pada perlindungan PMI saat di Malaysia.

"Sebagai sebuah perjanjian, nota kesepakatan ini harus menjadi payung yang dihormati semua pihak. Jika ada persoalan seperti sekarang ini semangatnya segera menjadi jalan keluar bagi kedua negara jangan sampai teman-teman PMI yang menjadi korban," sebut Anggota DPR RI Dapil Luar Negeri, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan ini.

Kurniasih yakin semangat

mencari solusi bersama bisa dikedepankan sebab dalam perjanjian Indonesia-Malaysia kedua pihak sejatinya bisa mendapatkan manfaat bersama.

"Bahwa ada persoalan yang didapatkan saat menerapkan MoU adalah hal yang bisa terjadi sehingga kedua pihak bisa segera duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan. Teman-teman PMI masih menunggu hasil yang terbaik," kata Kurniasih.

Kurniasih yakin baik pihak Indonesia dan Malaysia bisa kembali duduk bersama sehingga persoalan ini bisa cepat selesai dan kedua negara mendapatkan manfaat dari kerjasama ini.



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**  
Anggota Komisi IX DPR RI

"Pemerintah Indonesia masih menghentikan sementara proses pengiriman PMI dari Indonesia ke Malaysia untuk memperbaiki sistem penerimaan PMI agar sesuai dengan MoU. Saya kira dialog sudah bisa dimulai apa yang menjadi keberatan dan catatan pemerintah Indonesia bisa benar-benar diperhatikan oleh Pemerintah Malaysia dan melakukan perbaikan-perbaikan. Semangatnya teman-teman PMI bisa bekerja di Malaysia dengan perlindungan yang maksimal,"



# Nasib Nakes Honorer Tidak Jelas, Aleg PKS: Pelayanan Kesehatan Berpotensi Kolaps

## KUTIPAN

Jakarta (19/07) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani mengatakan berdasarkan PP No 49 Tahun 2018 yang dilanjutkan dengan SE Kemen PAN-RB No B/185/M.SM.02.03/2022 seluruh honorer akan dihapus dari instansi pemerintah per 28 November 2023.

Ketentuan ini, menurut Netty, akan membuat nasib ratusan ribu nakes honorer yang bekerja di instansi pemerintah menjadi tidak jelas.

"Sampai saat ini belum ada kejelasan status nakes honorer yang sudah bekerja puluhan tahun melayani kesehatan masyarakat. Jika tidak segera diatasi, maka akan banyak nakes yang di-PHK akibat adanya ketentuan tersebut," kata Netty dalam keterangannya, Selasa (19/07).

Menurut Netty, alternatif lain dari PHK adalah mengangkat para honorer tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Persoalannya, apakah Pemda siap mencover biaya belanja PPPK yang dibebankan pada anggaran daerah? Berdasarkan info yang saya dapatkan, rata-rata Pemda hanya sanggup mengalokasikan 10 persen saja untuk formasi Nakes PPPK," jelasnya.

Jumlah tersebut tentu sangat kecil di bandingkan jumlah nakes honorer yang selama ini melayani kebutuhan kesehatan masyarakat di lapangan, katanya.

Ia mencontohkan, jumlah honorer nakes di Kabupaten Indramayu yang merupakan

daerah pemilihannya ada sekitar 1.886 orang dan di Kabupaten Cirebon ada sekitar 1500-an.

Oleh karena itu, kata Netty, pemerintah pusat harus membuat kebijakan afirmasi guna mengatasi persoalan ini.

"Pemerintah pusat tidak bisa melempar tanggung jawab persoalan nakes honorer ke pemerintah daerah begitu saja. Harus ada kejelasan bagaimana cara Pemda membiayai pengangkatan PPPK. Jangan sampai nanti hanya jadi angin surga: Pemda menyetujui mengangkat sebagai PPPK ternyata tidak ada anggarannya," kata Netty.

Netty meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama mencari solusi.

"Alternatifnya, apakah dengan menambah Dana Alokasi Umum (DAU) atau bahkan ada Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembiayaan PPPK," katanya. Z

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



**Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si**  
Anggota Komisi IX DPR RI

"Bisa dibayangkan nasib pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas-Puskesmas di daerah yang kolaps akibat PHK nakes honorer. Kalau ini terjadi maka indeks kesehatan kita akan anjlok, gangguan kesehatan meningkat, prioritas nasional ke-3; yaitu membangun SDM yang sehat, unggul, dan berkualitas makin absurd,"

# Hadiri Latihan Timnas Sepakbola Amputasi, Aleg PKS Ajak Pemerintah dan Rakyat Indonesia Dukung Sepenuhnya

## KUTIPAN

Jakarta (14/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menghadiri dan memantau langsung lokasi Training Center (TC) Timnas Sepakbola Amputasi Indonesia di Sports Club Serenia Mansion, Jakarta Selatan, Rabu pagi (13/07).

Dalam kesempatan itu, Ledia menyapa seluruh pemain dan official Timnas, sekaligus memberi semangat kepada mereka semua guna menyongsong Piala Dunia Sepakbola Amputasi yang rencananya akan diselenggarakan pada Oktober mendatang.

"Kami berharap teman-teman semangat. Saya lihat pelatihnya sudah bagus, memberikan materi latihan yang terbaik. Semoga kemampuan dan performa tim semakin meningkat, dan mencapai

puncaknya di gelaran Piala Dunia nanti", ujar Ledia.

Anggota DPR RI dari Dapil Cimahi-Bandung ini pun mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan terbaik kepada Timnas Sepakbola Amputasi Indonesia.

"Ini pertama kalinya timnas kita bisa berlaga di Piala Dunia. Oleh sebab itu, dukungan semua stakeholder sangat diperlukan. Saya lihat, dukungan dari pihak Pemerintah sudah mulai masuk, semoga ini konsisten dan berkesinambungan. Tak

lupa, bagi pihak-pihak lain yang ingin memberi support, silakan, misalnya pemenuhan gizi tambahan bagi pemain dan sebagainya", lanjutnya lagi.

Terakhir, Ledia selaku Anggota DPR dari Fraksi PKS mengungkapkan harapan dan dukungannya agar Timnas Sepakbola Amputasi Indonesia dapat terus berprestasi, baik di regional Asia maupun Dunia.

"PKS tentu akan komitmen mendukung Timnas Sepakbola Amputasi. Harapan kami, timnas bisa memperoleh prestasi yang terbaik, khususnya di event terdekat nanti, yakni di Piala Dunia", pungkasnya.



**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**

Anggota Komisi X DPR RI

"Ini pertama kalinya timnas kita bisa berlaga di Piala Dunia. Oleh sebab itu, dukungan semua stakeholder sangat diperlukan. Saya lihat, dukungan dari pihak Pemerintah sudah mulai masuk, semoga ini konsisten dan berkesinambungan.

# Inflasi AS Potensial Pengaruhi Ekonomi Nasional, Aleg PKS: Jaga Stabilisasi Harga

## KUTIPAN

Jakarta (17/07) --- Inflasi Amerika Serikat (AS) diberitakan melonjak 9,1 persen di bulan Juni 2022. Hal ini dinilai akan berdampak kepada ekonomi Indonesia.

Sejumlah pihak menekan Bank Indonesia agar segera menaikkan suku bunganya untuk menyelamatkan diri dari dampak inflasi AS.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, membenarkan informasi tentang kondisi lonjakan inflasi AS tersebut.

"Ya, memang benar tentang kondisi lonjakan inflasi AS pasca terjadinya perang Ukraina dan Rusia. Tingginya inflasi AS tahun ini tentu berdampak ke beberapa negara termasuk ke Indonesia," kata Anis di Jakarta, Kamis (14/7/2022).

Inflasi di AS tersebut, jelas Wakil Ketua BAKN, akan berkaitan erat dengan kenaikan suku bunga.

"Rencana The Fed menaikkan suku bunga untuk mengantisipasi inilah, yang

dapat mendorong kenaikan dollar AS, memicu capital outflow, dan juga kenaikan harga komoditas, yang nantinya akan berdampak pada kenaikan inflasi di negara kita," ujarnya.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menyatakan adanya sisi keuntungan yang bisa diraih oleh Indonesia.

"Sebenarnya di satu sisi, kenaikan komoditas seperti batu bara, sawit akan menguntungkan bagi Indonesia karena kita adalah negara eksportir komoditas tersebut. Tetapi untuk minyak mentah akan berbeda karena kita negara importir," jelas Anis.

Namun, Anis menekankan bahwa saat ini yang paling penting adalah bagaimana Pemerintah menjaga daya beli masyarakat, karena inflasi akan

berdampak pada kenaikan harga, yang saat ini tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan, utamanya bagi kalangan menengah ke bawah.

"Kondisi masyarakat kita saat ini sedang dalam masa pemulihan akibat dampak pandemi, dan sangat disayangkan masyarakat harus langsung dihadapkan pada melambungnya harga berbagai kebutuhan pokok yang akan semakin menurunkan daya beli," lanjutnya.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menegaskan bahwa Pemerintah harus menjaga stabilitas harga BBM dengan berupaya keras untuk tidak menaikkan BBM, listrik dan juga gas karena hal ini akan semakin memberatkan beban masyarakat. Apalagi dengan PPN yang baru saja naik menjadi 11 persen.

"Pemerintah juga harus meningkatkan keberpihakan pada UMKM termasuk usaha ultra mikro, pemberian subsidi bagi petani dan nelayan sebagai salah satu pengendali inflasi," tegas Anis.

Politis senior PKS ini



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

"Rencana The Fed menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi inilah, yang dapat mendorong kenaikan dollar AS, memicu capital outflow, dan juga kenaikan harga komoditas, yang nantinya akan berdampak pada kenaikan inflasi di negara kita,"

mengingatkan bahwa satu hal yang harus dicermati oleh Pemerintah adalah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor.

"Ketergantungan impor selain memicu naiknya inflasi juga dapat memperparah

depresiasi nilai tukar rupiah. Untuk itu, sangat penting upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pada potensi dalam negeri," pungkaskanya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Follow  
Akun tiktok  
Fraksi PKS DPR RI**

**@fraksipksdprri**

Hadiri Peringatan Hari Keluarga Nasional di Dapil

# Nevi **Sampaikan** Optimalisasi Peran Perempuan Cegah Stunting

KUTIPAN

Bukittinggi (08/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II yang juga Pimpinan Wilayah Aliansi Perempuan Peduli Indonesia / PW ALPPIND Sumatera Barat, Nevi Zuairina pada kesempatan seminar memperingati hari keluarga nasional menyampaikan pentingnya optimalisasi peran perempuan dalam upaya pencegahan stunting di Sumatera Barat.

Nevi menyampaikan, bahwa ALPPIND yang memiliki visi 'Perekat Persaudaraan dan Kontribusi dalam membangun Indonesia berbasis nilai Agama dan Budaya', mesti dapat memperkuat sumbangsih untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Salah satunya menurutnya, adalah kepedulian Alppind terhadap masih cukup tingginya angka stunting di Sumatera Barat.

"ALPPIND mesti dapat Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam berbagai bentuk salah satunya melalui seminar dan webinar seperti ini. Core dari Alppind adalah Pengarusutamaan keluarga. Harus kita akui bahwa pengarusutamaan keluarga secara nasional masih dilakukan secara sektoral. Untuk itu, ALPPIND harus berkoordinasi dengan mitra karena tidak dapat berdiri

sendiri", tutur Nevi.

Politisi PKS ini menegaskan, bahwa Pencegahan stunting ini sangat penting dapat dilakukan karena akan menjadi pertaruhan kekuatan Sumber Daya Manusia bangsa ini di masa depan.

Ia melanjutkan, Keberadaan ALPPIND merupakan organisasi berbasis Agama dan Budaya bisa memberikan sumbangsih khususnya penurunan stunting bahkan Pengarusutamaan keluarga saat ini masih berjalan secara sepihak belum secara sektoral dan ALPPIND tidak bisa berdiri sendiri.

Nevi mendapati data terkait stunting ini, bahwa berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 lalu, prevalensi stunting di Sumbar turun signifikan dalam dua tahun terakhir. Dari yang sebelumnya berada pada angka 27,19 persen sekarang menjadi 23,3 persen. Sedangkan angka Prevalensi stunting nasional sebesar 24,4.

"Pola gizi dan pola asuh secara baik di keluarga berpengaruh pengurangan stunting,"ucap nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini mengharapkan, perempuan Indonesia khususnya para ibu untuk peduli dan meningkatkan pemahaman nya dalam upaya pencegahan stunting. Dengan memahami pola gizi yang baik dan pola asuh yang baik, maka akan ada kesadaran akan peningkatan kualitas anak-anak Indonesia



**Hj. NEVI ZUAIRINA**

Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Sumatera Barat II

"ALPPIND mesti dapat Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam berbagai bentuk salah satunya melalui seminar dan webinar seperti ini. Core dari Alppind adalah Pengarusutamaan keluarga. Harus kita akui bahwa pengarusutamaan keluarga secara nasional masih dilakukan secara sektoral"

bukan sekedar fisik, tapi juga pemikiran dan mentalnya.

"Peran perempuan khususnya seorang ibu sangat penting dalam keluarga, karena para ibu inilah yang mengandung, melahirkan bayi dan menyediakan makanan bagi anak dan keluarga lainnya.

Mari kita berkomitmen agar bangsa ini terutama Sumatera Barat, bebas dari Stunting sehingga mampu memberikan kontribusi nasional pada pengurangan stunting yang masih belum berada di angka aman menurut WHO", tutup Nevi Zuairina.



Terima Kunjungan Forsitma,

# Aleg PKS Ajak Tokoh Agama Berkontribusi bagi Kemajuan Bangsa

**KUTIPAN**

Jakarta (19/07) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyambut hangat kunjungan Forum Silaturahmi Majelis Taklim (FORSITMA) Jakarta Timur di Gedung DPR-MPR RI, Senayan Jakarta, Selasa Pagi (18/07).

Selain bertemu dan bersilaturahmi bersama anggota komisi XI, Kunjungan yang dihadiri oleh 150 anggota FORSITMA ini juga diselingi dengan Tour Gedung DPR-MPR RI. Anis mengapresiasi kedatangan dan semangat seluruh ustazah dari Jakarta Timur.

"Alhamdulillah, kita harus senantiasa menjaga tali silaturahmi ini, melihat semangat perjuangan Ustadzah menjadi penyemangat kita bersama terutama bagi saya yang InsyaAllah senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas dan amanat

ini", ungkap Wakil Ketua BAKN tersebut.

Di akhir sesi, Anis menutup uraiannya dengan mengajak seluruh tokoh dan ustadzah dari forum silaturahmi majelis Ta'lim (FORSITMA) Jakarta Timur untuk bahu membahu berjuang bersama PKS untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

"Kontribusi para ustadzah sangat dinantikan untuk bersama membangun Indonesia", pungkasnya.



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Alhamdulillah, kita harus senantiasa menjaga tali silaturahmi ini, melihat semangat perjuangan Ustadzah menjadi penyemangat kita bersama terutama bagi saya yang InsyaAllah senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas dan amanat ini",

# Banyak Kasus TPKS di Lingkungan Pendidikan, Wakil Ketua FPKS: Perhatikan Aspek Preventif dan Perlindungan

## KUTIPAN

Jakarta (21/07) — Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani mengatakan banyaknya kasus kejahatan seksual di lingkungan pendidikan yang terungkap belakangan ini dapat menjadi indikator adanya fenomena gunung es yang menimpa peserta didik.

"Saya khawatir ini menjadi indikator fenomena gunung es, kasus sebenarnya jauh lebih banyak. Kondisi ini tentu menodai lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan jati diri dan karakter anak bangsa," ujar Netty saat memberikan sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al Islah, Bobos, Kab Cirebon, pada Rabu, (20/07/2022).

Menurut Netty, peserta didik berhak mendapatkan lingkungan yang aman, terlindungi dari kekerasan dan jauh dari ancaman bahaya.

"Mereka adalah generasi harapan bangsa yang berpeluang mengisi pos-pos penting di masyarakat maupun negara di masa depan. Bagaimana nasib mereka jika mengalami kejahatan seksual dalam masa pendidikannya," ujarnya.

Netty menambahkan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan adalah karena pelaku merasa memiliki kekuasaan dan berhak berlaku sewenang-wenang pada peserta didik. Kekuasaan pelaku membuat korban tidak berdaya dan takut melapor.

Dalam laporan Komnas Perempuan, bahwa pada

periode 2015-2021 sebanyak 67 kasus kekerasan seksual terjadi di sekolah dan perguruan tinggi. Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yakni kekerasan seksual mencapai 87,91 persen.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar menindaklanjuti pengesahan UU TPKS dengan peraturan pemerintah sebagai turunannya sehingga dapat berdampak pada penurunan kasus.

"Payung hukum berupa undang-undang saja tidak cukup. Diperlukan respon institusi pendidikan untuk membuat regulasi turunan, termasuk mekanisme preventif dan perlindungannya," ujarnya.

Menurut Netty, jika terjadi kasus, institusi pendidikan harus bergerak cepat merespon, melindungi korban dan membantu proses pelaporan.

"Jangan malah ditutup-tutupi. Otoritas institusi harus siap mendampingi korban, termasuk memberi akses pemulihan kondisi korban," ungkapnya.

Terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan ternama di Jawa



**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VIII

Payung hukum berupa undang-undang saja tidak cukup. Diperlukan respon institusi pendidikan untuk membuat regulasi turunan, termasuk mekanisme preventif dan perlindungannya"

Timur yang melibatkan tokoh lembaga, Netty meminta pihak kepolisian melakukan upaya terbaik untuk mengungkap kebenaran.

"Kasus ini sudah lama terjadi dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Penyelesaian kasus sesuai hukum secara adil dan

transparan akan menjadi momentum penegakan hukum TPKS. Indonesia harus memastikan menjadi negara yang bermartabat dengan adanya perlindungan terhadap perempuan, anak-anak dan semua warga negara dari segala bentuk perilaku kejahatan seksual," tutup Netty

# Hermanto: UU Provinsi Sumbar, Dukungan Negara untuk Ciri Khas Budaya Minang

## KUTIPAN

Padang (17/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Sumbar I Hermanto menyebutkan, telah disahkannya Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat berarti memberikan landasan yuridis yang kokoh bagi Sumatera Barat sebagai provinsi.

Dalam UU tersebut menguatkan ciri khas provinsi sumbar sebagai daerah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK).

"Dengan demikian, Negara mengakui bahwa di Provinsi Sumbar berlaku hukum adat dan budaya yang di dasarkan atas ABS-SBK dan adat salingka nagari. Saya menyambut baik dan mendukung sepenuhnya UU tersebut", ujar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (16/07/2022).

"Sekalipun demikian, dalam pelaksanaannya, UU Provinsi Sumbar tetap harus selaras dan menjadi bagian dari hukum positif NKRI," tambah legislator dari FPKS DPR RI ini.

UU Provinsi Sumbar disahkan sebagai undang-undang pada Rapat Paripurna DPR 30 Juni 2022 lalu. UU ini menggantikan UU No. 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.

"Dengan disahkannya UU Propinsi Sumbar, maka diharapkan dapat mengakhiri isu dan polemik tentang pemekaran Propinsi Sumbar yang tengah terjadi di masyarakat," ucap Hermanto.

Dalam UU Sumbar dijelaskan bahwa adat dan budaya Minangkabau didasari pada nilai falsafah dengan

karakter religius.

"Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara', syara' basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku," demikian bunyi Pasal 5 huruf C UU tentang Provinsi Sumatera Barat.

Yang dimaksud dari adat basandi syara', syara' basandi kitabullah adalah adat bersumber kepada syara' atau syariat Islam. Sementara kitabullah berarti Alquran.

"Pelaksanaan nilai falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," demikian penjelasan Pasal 5 huruf C.

Dalam UU ini dijelaskan bahwa Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Wilayah administratif kabupaten di Sumbar antara lain, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok



**Dr. HERMANTO, S.E., M.M**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

"Negara mengakui bahwa di Provinsi Sumbar berlaku hukum adat dan budaya yang di dasarkan atas ABS-SBK dan adat salingka nagari. Saya menyambut baik dan mendukung sepenuhnya UU tersebut"

Selatan, dan Pasaman Barat.

Sementara wilayah administratif berupa kota antara lain Padang, Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Pariaman.

Seluruh UU itu memberikan kepastian dan kekuatan bagi produk hukum turunan di daerah tersebut, seperti peraturan daerah

(perda) dan peraturan kepala daerah (perkada). Juga kepastian bagi kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.

Terima Kunjungan Forum  
OSIS dan Mahasiswa

## Aleg PKS Ingatkan Pentingnya Peran Generasi Muda

### KUTIPAN

Jakarta (15/07) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari, menerima kunjungan dari Forum OSIS Kabupaten Bandung Barat dan Mahasiswa Peradaban di Gedung DPR-MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat pagi (15/07).

Dalam kesempatan itu, Diah mengajak generasi muda, khususnya siswa/siswi SMA di Bandung Barat, untuk giat belajar demi menggapai mimpi di masa depan.

"Anak-anak muda perlu untuk terus mengasah pola pikir, kemampuan, dan keahlian dalam berbagai bidang. Usia muda memberikan kita peluang untuk terus belajar dari beragam sumber pembelajaran", ungkap Diah.

Ia pun menegaskan bahwa peran serta generasi muda sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia mendatang. Terlebih, Indonesia akan menerima berkah bonus demografi.

"Generasi muda lah yang akan meneruskan estafet perjuangan dan mengambil alih kepemimpinan bangsa. Oleh sebab itu, anak muda perlu mempersiapkan dirinya dengan baik agar mampu menjawab tantangan zaman", ujar Anggota Komisi VII DPR RI tersebut.

Terakhir, Diah berpesan agar generasi muda mampu mengambil peran keteladanan.

"Anak muda harus bisa mengambil peran keteladanan. Masyarakat kita butuh contoh-contoh teladan untuk mempraktikkan nilai-nilai baik. Karenanya, kita semua diharapkan mampu menjadi teladan bagi masyarakat", pungkasnya.



Dipl.Ing. Hj. **DAH**  
**NURWITASARI**, M. I. POL.  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat II

"Anak muda harus bisa mengambil peran keteladanan. Masyarakat kita butuh contoh-contoh teladan untuk mempraktikkan nilai-nilai baik. Karenanya, kita semua diharapkan mampu menjadi teladan bagi masyarakat",



# Live Interactive

Bersama  
Anggota  
Legislatif PKS



ERLANDA

WIDYA

YOANDRO



## Saksikan Setiap Jum'at

pk. 13.30 s.d 14.30 WIB







Lindungi WNI Calon PMI di Malaysia

# HNW: Malaysia Harus Konsisten Laksanakan MoU

## KUTIPAN

Jakarta (17/07) -- Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengingatkan agar demi kemaslahatan bersama seharusnya Pemerintah Malaysia menjalankan nota kesepahaman (memorandum of understanding) terkait pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara konsisten.

Hal demikian, kata Hidayat, sebagai wujud menghormati kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia, agar Pengiriman Pekerja Migran Indonesia dapat segera dilakukan lagi, juga sebagai bukti adanya niatan baik dari pihak Malaysia untuk hadirkan masalah dan perlindungan bagi WNI yang berprofesi sebagai PMI di Malaysia, dan agar tidak terulangnya kembali berbagai masalah yang terkait dengan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.

Hal tersebut disampaikan HNW merespon kebijakan Pemerintah Indonesia yang menghentikan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia karena menilai bahwa Pemerintah Malaysia tidak

menjalankan MoU yang sudah ditandatangani bersama.

"Di dalam MoU tersebut disepakati bahwa perekrutan PMI sektor domestik di Indonesia yang satu-satunya dan legal adalah melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS). Namun, di dalam prakteknya, masih ada perekrutan melalui sistem lain, yakni Sistem Main Online," ujar Hidayat.

Menurut HNW, sapaan akrabnya, persoalan ini harusnya segera diselesaikan dengan duduk bersama, dengan kepala yang dingin tapi tetap dengan komitmen yang tinggi terhadap MoU yang sudah disepakati. Sehingga, persoalan penghentian pengiriman PMI ke

Malaysia ini tidak merugikan kedua belah pihak.

"Sebab bila terus-terusan seperti ini, kan dua-duanya menjadi rugi, baik dari sisi Malaysia maupun dari sisi Indonesia," tukasnya melalui siaran pers di Jakarta.

Karena di satu sisi, ada banyak warga negara Indonesia (WNI) yang memerlukan pekerjaan termasuk di Malaysia. Sementara itu, di sisi lain, pihak Malaysia memerlukan pekerja migran yang tidak sedikit.

"Dengan penghentian ini, Malaysia terancam kekurangan sekitar 1,2 juta pekerja yang dapat menggagalkan pemulihan ekonomi di negara tersebut," pungkasnya.

Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa kesepakatan untuk melaksanakan MoU baik dari sisi Pemerintah Malaysia maupun Pemerintah Indonesia merupakan suatu hal yang mutlak sebagai bentuk bagi perlindungan PMI di Malaysia, termasuk di sektor pekerja domestik.

"Saya mendukung dilaksanakannya MoU tersebut secara konsekwen, karena MoU itu memang dihadirkan untuk memberi perlindungan kepada PMI di Malaysia, dan masalah bagi Indonesia dan Malaysia,"



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Persoalan ini harusnya segera diselesaikan dengan duduk bersama, dengan kepala yang dingin tapi tetap dengan komitmen yang tinggi terhadap MoU yang sudah disepakati. Sehingga, persoalan penghentian pengiriman PMI ke Malaysia ini tidak merugikan kedua belah pihak."

ujarnya.

Lebih lanjut, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jakarta II yang meliputi Luar Negeri ini menyatakan mendukung sikap pemerintah Indonesia yang memang harus secara

maksimal mengupayakan dan memberikan perlindungan kepada WNI yang berprofesi sebagai PMI di Malaysia, dan juga PMI di negara-negara lain.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Serahkan Bantuan Ambulance di Dapil, Alifudin Harap **Lebih Maksimal** Layani Masyarakat

## KUTIPAN

Pontianak (15/07) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Dapil Kalimantan Barat 1, memberikan bantuan sebuah mobil pusat pelayanan rakyat (Puspera) ke DPW PKS Kalbar, pada hari Rabu (13/07/2022) di halaman kantor PKS Kalbar.

Bantuan Mobil Puspera diterima langsung oleh Yon Kusnedi, ketua bidang Kesejahteraan Sosial DPW PKS Kalbar. Alifudin berharap dengan adanya mobil Puspera ini, PKS Kalbar semakin maksimal dalam melayani masyarakat.

"Insyallah kerja PKS dalam melayani rakyat semakin nyata, dan mudah-mudahan bantuan mobil pusat pelayanan ini menambah semangat para pengurus, kader dan simpatisan PKS Kalbar," Ucap Alifudin.

Alifudin, yang juga Anggota Komisi IX DPR RI, meminta agar menjaga dan merawat mobil Puspera ini, dan segera 'gaspool' dalam memberikan bantuan-bantuan kepada

masyarakat.

Dengan adanya mobil Puspera pelayanan kepada masyarakat semakin bertambah dan meluas, dan jangan sampai mobil ini hanya jadi pajangan, harus gaspool dalam aksi aksi kemasyarakatan, sehingga kehadiran PKS sangat terasa oleh masyarakat kalbar," harapnya.

Yon Kusnedi, ketua bidang Kesejahteraan sosial (Kesos) DPW PKS Kalimantan Barat, menyampaikan bahwa bantuan ini insyallah akan dioperasikan untuk masyarakat kalbar, dan bukan hanya kader atau pemilih PKS.

"Saya ucapkan terima

kasih yang tak terhingga kepada Bang Alif atas bantuan 1 unit mobil Pusat Pelayanan Masyarakat dan ini untuk kebutuhan warga dan insya Allah dengan adanya mobil Puspera ini akan lebih banyak masyarakat yang terlayani," ujar Yon.

Yon juga menambahkan dengan adanya mobil Puspera ini menambah jumlah armada mobil pelayanan yang dimiliki PKS Kalbar.

Di tempat terpisah, Arif Joni, Ketua DPW PKS kalbar mengapresiasi atas bantuan yang diberikan Alifudin, dan ini menjadikan 'performance' PKS sebagai partai Pelayanan masyarakat semakin nyata.

"Alhamdulillah, selain ambulance sekarang PKS Kalbar memiliki mobil Puspera, dan saya yakin ini akan semakin banyak masyarakat yang bisa terlayani oleh PKS," tutupnya.



**H. ALIFUDIN, S.E.,M.M**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

“Dengan adanya mobil Puspera pelayanan kepada masyarakat semakin bertambah dan meluas, dan jangan sampai mobil ini hanya jadi pajangan, harus gaspool dalam aksi aksi kemasyarakatan, sehingga kehadiran PKS sangat terasa oleh masyarakat kalbar”



# Jelang Bulan Kemerdekaan, Aus Hidayat Nur Kunjungi Veteran di Balikpapan

**KUTIPAN**

Balikpapan (25/07) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur mengawali reses masa persidangan V dengan kunjungan ke Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Balikpapan.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Joseph Worang (Ketua) dan Max Lumintang (Sekretaris) di sekretariat LVRI Balikpapan, Kelurahan Klandasan Ilir.

"Bagi PKS, penting untuk mengenang jasa para pembela negara. Yaitu para veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. PKS akan terus berjuang untuk membela kepentingan NKRI, yang telah diperjuangkan oleh para veteran," ungkap Anggota DPR RI Fraksi PKS asal Kalimantan Timur tersebut.

"Bahkan dalam visi PKS sangat ditegaskan, bahwa kehadiran PKS untuk mewujudkan

cita-cita nasional sesuai Pembukaan UUD 1945," tambahnya.

Selain menyerap aspirasi dari para veteran, Aus Hidayat Nur juga menyampaikan bantuan operasional untuk LVRI.

Ketua DPD PKS Balikpapan, Sonhaji, yang turut menemani pun menyampaikan bahwa PKS Balikpapan siap untuk terus berkomunikasi dengan LVRI Balikpapan.



**KH. AUS HIDAYAT NUR**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Timur

"Bagi PKS, penting untuk mengenang jasa para pembela negara. Yaitu para veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. PKS akan terus berjuang untuk membela kepentingan NKRI, yang telah diperjuangkan oleh para veteran"



# Buka Bimtek di Dapil, Andi Akmal: Pangan Sektor Strategis Penopang Kehidupan

## KUTIPAN

Watampone (24/07) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin bersama Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa (Polbintang Gowa) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh di kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

Anggota Komisi IV DPR RI ini terus berupaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Salah satu upayanya dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh pertanian di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

Sejumlah petani dan penyuluh di Kabupaten Bone hadir dalam kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh yang digelar di Hotel Helios, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Senin (18/07/2022).

Agenda bimtek dibuka oleh anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin didampingi

oleh Buhaerah mewakili Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa (Polbintang Gowa)

“Persoalan pangan ini sangat penting karena menyangkut kebutuhan perut kita. Hidup matinya sebuah bangsa, penopang utamanya adalah ketercukupan pangan. Sedangkan Maju dan berdayanya SDM suatu bangsa, adalah terpenuhinya kualitas pangan dengan gizi yang cukup untuk melawan stunting dan keterbelakangan”, tutur Akmal dalam sambutannya.

Karena menurut Legislator PKS ini walaupun kita banyak uang, banyak emas tapi tidak

ada makanan tentu tidak bisa juga dimakan itu uang sama emas.

“Saya sebagai wakil dari bapak dan ibu sekalian di Jakarta tentunya berusaha agar program program pembangunan terutama di sektor pertanian, perikanan dan lingkungan hidup ini bisa dirasakan oleh masyarakat kita,” ungkapnya saat membuka Bimtek.

Politisi ini juga menegaskan, bahwa setiap perwakilan di Senayan, kewajibannya bukan cuma pintar berbicara di Jakarta, akan tetapi harus ada juga yang dirasakan untuk masyarakat agar kehadiran wakil rakyat itu menjadi tumpuan bagi konstituenya.

Menurutnya, upaya wakil rakyat untuk ideal adalah bersuara di Jakarta sebagai fungsi pengawasan di DPR, daerah pemilihan, dan di dapil juga ada yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Dr. H. ANDI AKMAL  
PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

“Jangan sampai kita kalah pintar dari petani kita maka dari itu kita harus lebih update harus lebih banyak membaca Sehingga teknologi dan perkembangan perkembangan pertanian bisa kita kembangkan. Jadi ketika lahannya sangat terbatas maka kita harus naikkan produktivitasnya, kita harus naikkan efektivitasnya dan efisiensinya Karena kalau tidak efisien kemudian lahan kita hanya tiga ton per hektarnya seperti padi misalnya itu tidak menutupi biaya operasionalnya”

# Kunjungi Pidie Jaya, Rafli Serap Aspirasi dan Dialog Dengan Forum Kades

## KUTIPAN

la mengajak masyarakat sinergi, melakukan pembangunan dari desa, baik fisik maupun nonfisik, melalui BUMG bersama yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Pidie Jaya (22/07) — Anggota DPR RI Rafli Dapil 1 Aceh, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Pidie Jaya, melakukan serapan aspirasi dan dialog dengan Forum Kepala Desa di Mukim Dalam Meureudu, Pidie Jaya, Jum'at (22/07)

Kesempatan pagi jelang siang Jum'at tadi, Rafli mendengar keluhan masyarakat melalui Kades, dan para tokoh setempat.

la mengajak masyarakat sinergi, melakukan pembangunan dari desa, baik fisik maupun nonfisik, melalui BUMG bersama yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

"Terukur dan analisis, kita

ajak sepakat lakukan konsorsium, membangun pilot project kerjasama yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi" Kata Rafli

Saat dialog dengan legislatif Komisi VI itu diantaranya, Kepala Desa Menasah Lhok Rahmadi menyampaikan permohonan agar difasilitasi berdialog dengan komisi yang bermitra dengan Kementerian Desa di Jakarta, terkait prioritas penggunaan dana desa.

"Kami harapkan difasilitasi kesempatan berdialog langsung terkait prioritas penggunaan dana desa dengan komisi terkait di Senayan," ujarnya.

Selain menyuati sejumlah persoalan dari Desa, aspirasi

masyarakat bidang pendidikan terintegritas, juga menjadi sorotan dalam dialog tersebut.

Menurut Rafli pendidikan terintegritas dengan konsep boarding school harus kita dukung dan upayakan realisasinya bersama-sama.

"Khusus di Aceh ada banyak sumber keuangan bidang Pendidikan, seperti Kemenag, Disdik, dan Badan Dayah. Lembaga berbasis pendidikan itu perlu serius menangani hal ini," ujar Rafli

Hadir pada pertemuan di Kota Meureudu tadi, Anggota DPR RI Rafli, didampingi Tenaga Ahli, Ka.Polsek dan Camat setempat, Imum Mukim dan sejumlah Kepala Desa di Pidie Jaya.



## RAFLI

Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Nanggroe Aceh Darussalam I

“Pendidikan terintegritas dengan konsep boarding school harus kita dukung dan upayakan realisasinya bersama-sama.

Khusus di Aceh ada banyak sumber keuangan bidang Pendidikan, seperti Kemenag, Disdik, dan Badan Dayah. Lembaga berbasis pendidikan itu perlu serius menangani hal ini”





# Aleg PKS Helat Pemeriksaan Mata Gratis di Desa Karang Mulya, Jamanis, Tasikmalaya

## KUTIPAN

Tasikmalaya (20/07) — Pada masa reses sidang V 2021-2022, diantara kegiatan yang dilaksanakan oleh Toriq Hidayat adalah program bakti sosial

Tepatnya tanggal 19 Juli 2022, Desa Karang Mulya Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya menjadi awal tempat berlangsungnya kegiatan sosial tersebut.

Kegiatan yang dihelat oleh Anggota DPR RI asal Fraksi PKS ini berupa pemeriksaan mata dan bantuan pemberian kacamata secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik dewasa usia 40-an dan lansia. JM optik Tasikmalaya menjadi lembaga yang bekerjasama untuk melakukan pemeriksaan mata.

Dalam arahnya, Toriq Hidayat menyebutkan bahwa mata merupakan salah satu organ tubuh yang akan mengalami fungsi penurunan baik dikarenakan pola hidup,

penyakit dan alamiah, terutama bagi lansia.

“Bagi lansia, umumnya mereka mengalami presbiopi atau rabun tua. Ini bukan penyakit. Melainkan penurunan kemampuan mata ketika melihat dekat, jauh, cahaya remang-remang maupun yang menyilaukan. Akibatnya terjadi penurunan kualitas dalam melihat,” ujar Aleg asal Dapil Jabar XI ini.

Toriq menyebutkan seringkali penurunan kualitas penglihatan ini tidak diindahkan oleh sebagian masyarakat, terutama yang tinggal dipedesaan. Umumnya kondisi ini disebabkan keterbatasan pengetahuan warga desa.

“Oleh karenanya kami berinisiatif mengadakan

kegiatan ini, selain langsung melakukan pemeriksaan kami juga memberikan edukasi pentingnya menjaga kesehatan mata sejak dini. Bagi yang terindikasi harus perawatan medis, kami bantu rujukannya. Sedang yang hanya membutuhkan kacamata maka kami bantu secara cuma-cuma,” ujarnya.

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga petang ini, dihadiri ratusan warga yang merasa penglihatannya kurang optimal. Mewakili peserta pemeriksaan, Tokoh Desa Karang Mulya memberikan apresiasi kepada Toriq dan PKS atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada warga desanya.



## KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

“kami berinisiatif mengadakan kegiatan ini, selain langsung melakukan pemeriksaan kami juga memberikan edukasi pentingnya menjaga kesehatan mata sejak dini. Bagi yang terindikasi harus perawatan medis, kami bantu rujukannya. Sedang yang hanya membutuhkan kacamata maka kami bantu secara cuma-cuma”



Terima Kunjungan Civitas  
Universitas Majalengka

## Aleg PKS Ajak Mahasiswa Beri Kontribusi Politik

### KUTIPAN

Jakarta (21/07) – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi, menerima kunjungan dari civitas akademika Universitas Majalengka di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (21/07).

Dalam pertemuan itu, Nurhasan memberikan paparan mengenai wawasan kebangsaan, peran anggota DPR, dan pentingnya keterlibatan generasi muda di dalam politik.

Menurutnya, anak muda memiliki posisi yang sentral dan vital dalam memberikan kontribusi politik di tengah masyarakat.

"Saya berharap, civitas akademika Universitas Majalengka, sebagai bagian dari masyarakat ilmiah menjadi garda terdepan untuk melakukan pendidikan politik, termasuk mengomunikasikan hal-hal seputar politik, menjelaskan kerja-kerja anggota DPR, sekaligus mampu menyalurkan aspirasi

masyarakat melalui kami di Fraksi PKS", ungkap Nurhasan.

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat IX ini pun berharap agar pertemuan bersama generasi muda, khususnya mahasiswa/i ini, bisa meningkatkan semangat mereka guna memajukan tanah air di masa depan.

"Semoga pertemuan ini, silaturahmi ini, bisa menjadi energi bagi kita untuk membangun umat, bangsa, dan negara kita tercinta, Indonesia", pungkasnya.



**H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IX

Saya berharap, civitas akademika Universitas Majalengka, sebagai bagian dari masyarakat ilmiah menjadi garda terdepan untuk melakukan pendidikan politik, termasuk mengomunikasikan hal-hal seputar politik, menjelaskan kerja-kerja anggota DPR, sekaligus mampu menyalurkan aspirasi masyarakat melalui kami di Fraksi PKS



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



# *Salurkan* **ASPIRASI ANDA** **DI HARI ASPIRASI** **FRAKSI PKS DPR RI**

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan  
setiap Selasa dan Jum'at.

**Ajuan Aspirasi**

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>

Hadiri Acara Hari Keluarga dan Anak Nasional

# Mahfudz: PKS Dukung dan Peduli Keluarga dan Anak Indonesia

## KUTIPAN

Bekasi (24/07) — Peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli dan Hari Keluarga Nasional pada 7 Juli lalu Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kota Bekasi menggelar agenda 'Gebyar Hari Keluarga dan Hari Anak Nasional Tahun 2022'.

Dengan mengambil tema Bersama PKS, Berkolaborasi Wujudkan Keluarga Berkualitras, Anak Indonesia Sehat dan Cerdas.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jawa Barat VI yang juga Bendahara Umum DPP PKS dan Pembina Rumah Keluarga Indonesia Kota Bekasi, Mahfudz Abdurrahman menghadiri Peringatan Hari Keluarga dan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS Kota Bekasi dan Rumah Keluarga Indonesia Kota Bekasi di Lapangan Pasar Baru Jatiasih, Kota Bekasi, Ahad, (24/07).

Pada kesempatan

sambutan dan arahan, Mahfudz Abdurrahman menyampaikan kepada hampir seribu peserta bahwa acara peringatan Hari Keluarga dan Hari Anak Nasional dari Pusat hingga ke tingkat ranting adalah bentuk kepedulian PKS terhadap persoalan keluarga dan persoalan anak.

Selain itu, imbuhnya, bentuk perhatian dan kepedulian lainnya ditegaskan juga bahwa PKS di DPR terus berjuang mengusulkan Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Walaupun sampai saat ini masih belum disetujui sebagai Undang-undang karena kurangnya dukungan di

Parlemen.

"Peringatan Hari Keluarga dan Hari Anak Nasional secara rutin dilaksanakan dan menjadi tradisi agenda PKS setiap tahunnya, dan ini menunjukkan bahwa PKS amat sangat perhatian dan peduli terhadap persoalan keluarga dan persoalan anak," kata Mahfudz.

"Bahkan kami PKS di DPR berjuang untuk terus mengusulkan Undang-Undang Ketahanan Keluarga sebagai bentuk perlindungan terhadap Keluarga Indonesia, walaupun sampai saat ini belum mendapatkan dukungan DPR secara keseluruhan untuk menjadi Undang-Undang yang sah. Oleh karena itu agar setiap usulan Undang-Undang yang berpihak kepada Keluarga dan masyarakat mendapat pengakuan dan dukungan maka suara PKS harus menang dan kursi di semua tingkatan dari DPR RI hingga DPRD Kota harus banyak. Dengan demikian PKS in syaa Allah akan terus memberikan ide dan gagasan yang berpihak kepada masyarakat dan bisa terwujud dalam sebuah Undang-Undang,"



## H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

“Peringatan Hari Keluarga dan Hari Anak Nasional secara rutin dilaksanakan dan menjadi tradisi agenda PKS setiap tahunnya, dan ini menunjukkan bahwa PKS amat sangat perhatian dan peduli terhadap persoalan keluarga dan persoalan anak”

tegas Mahfudz.

Acara peringatan Hari Keluarga dan Hari Anak Nasional di Kota Bekasi diisi dengan berbagai jenis agenda seperti lomba senam, pembagian sayur gratis, pemeriksaan gula darah dan asam urat gratis, games untuk anak dan ayah, konsultasi RKI dan bazaar kuliner, serta dihadiri oleh Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat yang juga

ketua DPD PKS Kota Bekasi Heri Koeswara, li Marlia Ketua RKI Kota Bekasi, Drajat Kardono Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Latu Hary Ketua Bidang Kepemudaan Kota Bekasi yang juga anggota DPRD Kota Bekasi, Para Tokoh Masyarakat dan puluhan Komunitas Senam dan masyarakat di Kota Bekasi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Peringati Hari Anak Nasional, Habib Aboe Ingatkan Pentingnya Lindungi Anak

## KUTIPAN

Habib Aboe mengingatkan bahwa perlindungan anak ini adalah kebutuhan bangsa. "Anak adalah masa depan bangsa, karenanya kita harus memberikan jaminan agar mereka terlindungi dan terdidik dengan baik. Jika kita bisa memberikan perlindungan yang baik, maka masa depan bangsa akan lebih baik juga," papar Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ini.

Banjarmasin (23/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsy menanggapi peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada Sabtu, (23/07).

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe ini, perlindungan anak merupakan bagian dari amanah konstitusi.

Hal tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

"Perlu diingat bahwa secara konstitusional,

perlindungan hukum terhadap anak oleh Negara sudah diatur dalam Pasal 28 B UUD NRI 1945. Negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi," terang Anggota Komisi III DPR RI ini.

Habib Aboe mengingatkan bahwa perlindungan anak ini adalah kebutuhan bangsa.

"Anak adalah masa depan bangsa, karenanya kita harus memberikan jaminan agar

mereka terlindungi dan terdidik dengan baik. Jika kita bisa memberikan perlindungan yang baik, maka masa depan bangsa akan lebih baik juga," papar Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ini.

Selain itu, Habib Aboe juga mengingatkan kepada seluruh anak bangsa agar tidak ada lagi perundungan yang dilakukan terhadap anak-anak.

"Kita perlu ingat Pasal 28 G UUD 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi. Ini berarti tidak boleh ada praktik bullying untuk anak-anak kita," jelas Anggota MPR RI dari Dapil Kalsel 1 ini.

"Hari ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional, ini merupakan momentum kita untuk mengingat kewajiban untuk memberikan perlindungan anak, baik dalam hal akses pendidikan, kesehatan maupun di bidang keamanan", tutup Habib Aboe.



## HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I

"Perlu diingat bahwa secara konstitusional, perlindungan hukum terhadap anak oleh Negara sudah diatur dalam Pasal 28 B UUD NRI 1945. Negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,"





# Ketua FPKS DPR: Seluruh Aleg PKS se-Indonesia Sukseskan Program PKS Tebar 1,5 Juta Paket Kurban

## KUTIPAN

Jakarta (10/07) — Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan seluruh anggota legislatif PKS dari pusat hingga daerah serentak melakukan pemotongan dan pendistribusian hewan kurban dalam rangka menyukseskan 'Program PKS Tebar 1,5 Juta Paket Kurban'.

Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu PKS tebar 1 juta paket kurban.

Menurut Jazuli Juwaini program ini dilaksanakan PKS setiap tahun untuk mensyiarkan syariat kurban agar lebih banyak lagi masyarakat yang merasakan kebahagiaan di hari raya idhul adha.

"Semakin banyak paket yang dibagikan, semakin luas jangkauan, semakin banyak kebahagiaan di hari mulia. Kita ingin seluruh rakyat Indonesia merasakan kebahagiaan di hari raya kurban ini," ungkap Jazuli.

Diharapkan program rutin PKS ini bisa menyasar khususnya masyarakat ekonomi



bawah, rakyat kecil, dan mereka yang terkena musibah di berbagai wilayah. Apalagi teruntuk mereka yang terdampak pandemi covid 19 yang belum sepenuhnya mengalami perbaikan (recovery)

Anggota DPR Dapil Banten ini mengatakan peresmian Program PKS Tebar 1,5 juta Paket Kurban akan dilakukan besok, Senin 11 Juli 2022 di Kantor DPP PKS oleh Ketua

Majelis Syura PKS Alhabib Dr. Salim Segaf Aljufri.

"Akan dilakukan pemotongan hewan kurban dan video konferensi dengan seluruh DPW PKS untuk menerima laporan pemotongan dan pendistribusian paket kurban di wilayahnya masing-masing," terangnya.

Jazuli sendiri tahun ini mendistribusikan sebanyak 7 ekor sapi dan 200 ekor kambing di daerah pilihannya dan lingkungan. Dirinya berharap semangat kurban menginspirasi seluruh komponen bangsa untuk sedia berbagi kebahagiaan, kepedulian, saling membantu dan tolong menolong dengan sesama anak bangsa.

"Syariat kurban selain bentuk ibadah kepada Allah adalah manifestasi hubungan dengan sesama atau hablum minannas yang semangatnya tidak boleh berhenti di momen idhul adha tapi berlanjut secara berkesinambungan di sepanjang hari melalui semangat ber-kurban untuk bangsa dan negara serta semangat menolong sesama," pungkasnya.



**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Program ini dilaksanakan PKS setiap tahun untuk mensyiarkan syariat kurban agar lebih banyak lagi masyarakat yang merasakan kebahagiaan di hari raya idhul adha. Semakin banyak paket yang dibagikan, semakin luas jangkauan, semakin banyak kebahagiaan di hari mulia. Kita ingin seluruh rakyat Indonesia merasakan kebahagiaan di hari raya kurban ini,"



# Tumbuhkan Solidaritas dan Kasih Sayang, Anis Tebar Hewan Qurban di Dapil

**KUTIPAN**

Jakarta (13/07) — Pada Hari Raya Idul Adha tahun 1443 H ini, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menebar hewan qurban 8 ekor sapi, 5 iuran sapi dan 20 ekor kambing.

Hewan qurban yang disediakan Anis ini disebar pembelihannya di DPP PKS, DPW PKS DKI Jakarta, DPD PKS Jakarta Timur, seluruh DPC PKS di Jakarta Timur, serta sejumlah relawan Anis Byarwati termasuk di daerah korban kebakaran Pasar Gembong, Jakarta Timur. Pemotongan hewan qurban ini dilakukan pada hari Ahad dan Senin, (10-11/07/2022).

Anis mengatakan bahwa tebar hewan qurban yang dilakukannya merupakan bentuk perhatian dan kepeduliannya untuk masyarakat Jakarta Timur.

“Spirit Idul Adha tidak hanya untuk perbaikan pada diri sendiri akan tetapi terdapat nilai-nilai positif untuk mengasah solidaritas sosial dan kasih sayang untuk sesama,” ujarnya. “Tebar hewan qurban ini



juga menjadi sarana silaturahmi antara masyarakat Jakarta Timur dengan wakilnya yang duduk di parlemen. Sehingga masyarakat merasakan kehadiran wakilnya, dengan berbagai program yang digulirkan diantaranya tebar hewan qurban ini.”

Ucapan terima kasih disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat yang menjadi panitia penyembelihan hewan qurban di lokasi Anis menitipkan hewan kurbanannya.

Mereka mengaku senang dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan Anis.

Mereka menyatakan qurban yang dititipkan Anis sangat bermanfaat untuk masyarakat. Daging qurban disampaikan kepada masyarakat sekitar lokasi penyembelihan, dengan prioritas sasaran masyarakat dhu'afa.

DPP PKS pada Idul Adha tahun 1443 H ini mencaangkan syi'ar Tebar 1.500.000 Paket Qurban yang dilakukan oleh struktur dan anggotanya. Syi'ar ini dilakukan oleh struktur dan anggota PKS di seluruh penjuru negeri. Tebar hewan qurban yang dilakukan Anis di Jakarta Timur merupakan bagian dan dukungan untuk syi'ar yang dicanangkan oleh DPP PKS.

“Semoga Tebar 1.500.000 paket qurban yang menjadi syi'ar PKS tahun ini, membawa keberkahan bagi negeri yang kita cintai ini. Juga mempererat hubungan antar elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan yang ada,” pungkas Anis.



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

“Tebar hewan qurban ini juga menjadi sarana silaturahmi antara masyarakat Jakarta Timur dengan wakilnya yang duduk di parlemen. Sehingga masyarakat merasakan kehadiran wakilnya, dengan berbagai program yang digulirkan diantaranya tebar hewan qurban ini.”



# Sukseskan Tebar 1,5 Juta Paket Kurban, Bukhori Tebar 20 Hewan Kurban di Dapil

## KUTIPAN

Semarang (12/07) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jawa Tengah 1 Bukhori Yusuf mendistribusikan ribuan paket daging kurban kepada warga di Dapil Jawa Tengah 1 yang meliputi Kabupaten dan Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal.

Pada peringatan Idul Adha 1443 H ini, Bukhori berkorban sebanyak tiga ekor sapi dan 17 ekor kambing.

"Kegiatan ini merupakan agenda rutin kami di dapil sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. Setiap tahunnya PKS selalu mengadakan program tebar jutaan paket kurban kepada masyarakat Indonesia, dan untuk tahun ini, Alhamdulillah kami dapat kembali berpartisipasi menyukseskan program PKS Tebar 1,5 Juta Paket Kurban," kata Bukhori, Senin (11/07/2022).

Anggota Komisi VIII DPR ini menambahkan, hewan kurban



tersebut dipercayakan pengelolannya, mulai dari pemotongan hingga pendistribusian, kepada pengurus DPD tingkat kabupaten/kota di Dapil Jawa Tengah 1.

"Sementara satu ekor sapi untuk Masjid Agung Kendal, kami percayakan pengelolannya kepada pengurus DKM di sana," tambahnya.

Ketua DPP PKS ini mengatakan, sasaran distribusi paket daging kurban ini diutamakan untuk warga miskin dan rentan miskin di dapil. Dia berharap daging kurban tersebut bisa meningkatkan taraf gizi dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Tidak lupa, Bukhori turut mengapresiasi kerja keras panitia di dapil yang ikut menyukseskan program PKS Tebar 1,5 Juta Paket Kurban.

"Terima kasih kepada segenap panitia di dapil yang telah mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pada momentum Idul Adha tahun ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian," pungkasnya.



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

"Kegiatan ini merupakan agenda rutin kami di dapil sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. Setiap tahunnya PKS selalu mengadakan program tebar jutaan paket kurban kepada masyarakat Indonesia, dan untuk tahun ini, Alhamdulillah kami dapat kembali berpartisipasi menyukseskan program PKS Tebar 1,5 Juta Paket Kurban



# Idul Adha 1443 H, Andi Akmal Ajak Masyarakat Berkurban sebagai Rasa Syukur dan Berbagi pada Sesama

**KUTIPAN**

Jakarta (10/07) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin (AAP) menyampaikan ucapan selamat Hari raya Idul Adha 1443 H.

Andi Akmal menyampaikan, Pada kesempatan Idul Adha tahun ini terasa begitu spesial untuk masyarakat Indonesia karena ibadah Haji di tanah Suci telah kembali berjalan untuk masyarakat tanah air dan dunia.

Politisi asal Kabupaten Bone ini, mengajak seluruh masyarakat agar memaknai perayaan Idul Adha adalah momentum untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

Akmal pun berdoa dan berharap kepada ALLAH SWT agar seluruh umat muslim di dunia khususnya di Indonesia senantiasa mendapat perlindungan dari segala macam marabahaya baik yang



ditimbulkan dari luar negara maupun dalam negara.

“Mari bersama-sama kita memaknai Idul Adha Tahun 1443 H / 2020 untuk terus menjaga semangat gotong-royong di tengah masyarakat dan rela berkorban. Semoga semua ibadah kita semua dapat diterima oleh ALLAH SWT,” kata Andi Akmal.

Anggota DPR RI Dapil II Sulsel ini menyampaikan,

korban yang dilaksanakan pada Idul Adha ini semata-mata bentuk Hamba untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena Idul Adha ini merupakan bukti sebuah pengorbanan dan keikhlasan pada hari yang suci.

Akmal menambahkan, pada Idul Adha 1443 H, dia berkorban enam ekor sapi dan akan diberikan kepada masyarakat. Ia berharap, Kurban ini menjadi sebuah hikmah untuk dimasa datang untuk lebih mendekatkan diri kepada yang maha kuasa sekaligus meningkatkan rasa sensitifitas terhadap masyarakat sekitar.

“Kita semua di dunia ini selalu terus berupaya meningkatkan kualitas diri agar menjadi lebih baik. Apa yang kita miliki ini semua titipan dari Allah SWT. Mari kita menyalurkan harta sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang sudah diberikan Allah kepada kita,” Tutup Andi Akmal Pasluddin.



**Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

“Kita semua di dunia ini selalu terus berupaya meningkatkan kualitas diri agar menjadi lebih baik. Apa yang kita miliki ini semua titipan dari Allah SWT. Mari kita menyalurkan harta sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang sudah diberikan Allah kepada kita”

# Maknai Idul Adha, Nevi Laksanakan Kurban pada 8 Kabupaten Kota di Sumbar

**KUTIPAN**

Padang (10/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina dalam memaknai Idul Adha tahun ini, seperti sebuah pembaharuan bagi umat Islam pasca pandemi covid 19, dimana sebelumnya selama 2 tahun, masyarakat Indonesia tidak dapat melaksanakan ibadah Haji.

Menurutnya, Memaknai Idul Adha sebagai momentum Pengabdian dan Pengorbanan juga sekaligus memperkuat nilai-nilai keikhlasan yang perlu ditanamkan kepada setiap insan Muslim di dunia, dan di Indonesia pada khususnya.

Nevi mengungkapkan kembali, akan peristiwa bersejarah ribuan tahun yang tak akan hilang hingga zaman berakhir ini bukan saja melekat pada peristiwa dua orang Ayah dan Anak yang menjalankan perintah Tuhannya.

Namun telah melekat juga, pelaku sosok perempuan yang dalam peristiwa hidupnya menjalani ujian kesabaran,



kepasrahan tawakkal atas perintah Tuhannya sekaligus ketaatan akan pembawa risalah yang maha pencipta melalui Suaminya sebagai Nabi dan Utusan umat di muka bumi.

"Alhamdulillah, tahun ini berkesempatan dapat berkurban merata di kabupaten kota Sumatera Barat II. Mudah-mudahan, dapat membantu meningkatkan aktivitas masyarakat dalam merayakan

Idul Adha, sekaligus menyambut seruan dari Ketua majelis Syuro PKS untuk berkontribusi 1.500.000 paket kurban seluruh Indonesia", tutur Nevi.

Politisi PKS ini mengutip kisah, sosok Hajar, sang bunda umat, yang telah melahirkan nabi, Moya dari Utusan terakhir di muka Bumi. Bunda Hajar adalah sosok simbol ketaatan, kesabaran dan pengorbanan pada peristiwa Hijrahnya seorang Ibu yang mengandung menjelang kelahiran, dan pengorbanan Ibu beserta bayi merah baru lahir di tengah tempat asing tanpa penghuni demi menjalankan perintah tuhanNya.

"Saya mengajak seluruh umat bangsa ini, termasuk kaum perempuan, untuk semakin memperkuat makna Idul Adha akan andilnya perempuan di muka bumi menjadi bagian penting tonggak sejarah yang tidak muncul di permukaan. Tanggal 8,9 dan 10 Hijjah 1441 H, ada kenangan syariat yang dilakukan umat Islam dari peristiwa keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Isma'il dan Bunda Hajar", ajak Anggota DPR yang duduk di Komisi VI ini. Anggota DPR yang juga di

**Hj. NEVI ZUAIRINA**Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Sumatera Barat II

"Saya mengajak seluruh umat bangsa ini, termasuk kaum perempuan, untuk semakin memperkuat makna Idul Adha akan andilnya perempuan di muka bumi menjadi bagian penting tonggak sejarah yang tidak muncul di permukaan. Tanggal 8,9 dan 10 Hijjah 1441 H, ada kenangan syariat yang dilakukan umat Islam dari peristiwa keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Isma'il dan Bunda Hajar"

duduk di Badan Anggaran ini menyampaikan, makna Idul Adha akan pengorbanan itu bukan bertujuan untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi pengorbanan itu atas perintah, tanpa harus tau maksud dan tujuannya.

"Nilah makna taat Muslim sesungguhnya. Maat Muslim

Indonesia, Berkorban, Mengabdikan dan Taat tanpa syarat, untuk mewujudkan kesempurnaan insan di sisi sang pencipta. Mari kita terus memaknai Idul Adha ini, untuk Masyarakat Indonesia yang semakin berbudaya dan bersahaja", tutup Nevi Zuairina.





# Tebar Hewan Kurban di Dapil, Netty: Jadikan Sebagai Momentum Saling Berbagi

## KUTIPAN

Jakarta (11/07) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengingatkan masyarakat agar Idul Adha menjadi momentum saling berbagi pada sesama.

"Idul Adha mengajarkan kita untuk saling berbagi dan peduli pada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini ada banyak masyarakat yang pendapatannya berkurang atau hilang sehingga sulit membeli daging sebagai sumber asupan bergizi," kata Netty dalam keterangan media.

"Mendapatkan daging kurban yang sehat, tinggi protein dan diberikan dengan keikhlasan dan rasa cinta tentu membahagiakan bagi para penerimanya," lanjut Netty.

Ketua DPP PKS Bidang Kesos mengatakan bahwa prosesi kurban sebagai ajaran agama terbukti memiliki dampak ekonomi dan sosial yang nyata.

"Para pedagang hewan kurban terbantu karena



dagangannya terjual, dan masyarakat pun mendapatkan makanan tinggi protein secara gratis," ujarnya.

Lebih lanjut, Netty mengatakan, "Pemenuhan makanan tinggi protein sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya calon ibu dan balita. Jika gizi terpenuhi tentunya akan berkorelasi dengan penurunan angka stunting yang masih bermasalah".

Pada Idul Adha 1433 H ini Netty membagikan hewan kurban berupa 7 ekor sapi dan 38 kambing/domba yang didistribusikan di beberapa titik di wilayah Cirebon, Indramayu,

Bandung Barat, Bali dan Bogor. Wakil Ketua FPKS DPR RI ini juga meminta pemerintah agar mengawasi hewan kurban dan penyembelihannya selama 3 hari tasryik.

"Pemerintah harus memitigasi dampak buruk yang mungkin terjadi. Pastikan hewan kurban sehat dan layak untuk dikonsumsi masyarakat. Lakukan pemeriksaan agar hewan kurban yang disembelih bebas dari wabah Penyakit Mulut Kaki (PMK). Satgas PMK harus sering-sering mengecek langsung ke lapangan, seperti masjid, RPH dan lain-lain," ujar Netty.

Terakhir, Netty meminta masyarakat agar berpartisipasi dalam pencegahan wabah PMK maupun penyakit-penyakit lainnya.

"Masyarakat harus terbuka dan melaporkan ke Satgas jika ada hewan yang kondisinya tidak sehat. Fatwa MUI hanya membolehkan untuk hewan dengan gejala ringan. Jangan paksakan untuk menyembelih hewan kurban dengan gejala berat. Kita tidak boleh memper-taruh-kan kesehatan masyarakat akibat mengonsumsi hewan berpenyakit," katanya.



## Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VIII

"Pemerintah harus memitigasi dampak buruk yang mungkin terjadi. Pastikan hewan kurban sehat dan layak untuk dikonsumsi masyarakat. Lakukan pemeriksaan agar hewan kurban yang disembelih bebas dari wabah Penyakit Mulut Kaki (PMK). Satgas PMK harus sering-sering mengecek langsung ke lapangan, seperti masjid, RPH dan lain-lain,"



# PKS Tebar 1,5 Juta Paket Kurban, Dr. Salim : Ibadah Kurban **Sarat Dengan** Nilai-Nilai Kebangsaan

**KUTIPAN**

Jakarta (11/07) — Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri meresmikan Program PKS Tebar 1,5 Juta Paket Kurban di Kantor DPTP PKS Simatupang Jakarta, Senin (11/07/2022).

Acara diisi dengan beragam kegiatan mulai pemotongan hewan kurban, telewicara dengan DPW PKS seluruh Indonesia tentang penyelenggaraan dan distribusi kurban, pesan kebangsaan idhul adha dari Ketua Majelis Syura PKS, hingga makan sate bersama wartawan.

Acara dihadiri juga oleh pejabat teras PKS baik secara online maupun offline antara lain Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid, Sohibul Iman, Suharna Surapranata, Ketua DSP PKS Surahman Hidayat, Presiden PKS Ahmad Syaikhul, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi, Bendahara Umum PKS Mahfudz Aburrahman, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, serta



Anggota Dewan PKS dan puluhan wartawan cetak, tv, dan elektronik.

Dalam pesan kebangsaan Idhul Adha yang disampaikan di DPTP PKS tersebut, Dr. Salim menjelaskan pelajaran penting dari syariat kurban yang musti dipahami dan diteladani oleh seluruh masyarakat khususnya umat Islam.

Dr. Salim menekankan bahwa kurban secara faktual adalah bentuk kepedulian kepada sesama karena ada daging yang dibagikan.

"Ini bentuk konkrit

wawasan kebangsaan bahwa kita semua memiliki negeri ini, mencintai negeri ini, dengan kesiapan berbagi kepada sesama anak bangsa hingga pelosok-pelosok daerah," ungkapnya.

Menurut Menteri Sosial 2009-2014 ini, PKS bukan banyak harta sehingga menghimpun 1,5 juta paket kurban tahun ini. Tapi, PKS mengerahkan seluruh anggota dewan dari pusat hingga daerah, gubernur, bupati dan walikota serta kader-kader PKS di berbagai tempat untuk mewujudkan semangat berbagi kepada rakyat melalui kurban.

"Alhamdulillah laporan yang saya terima target 1,5 juta paket itu sudah terlampaui. Semoga bermanfaat bagi penerima," ungkap Dr. Salim.

### **Pelajaran Kurban Untuk Bangsa**

Menurut Duta Besar RI Untuk Arab Saudi dan Kerajaan Oman 2005-2009 ini, ibadah kurban adalah syariat Islam yang diambil dari peristiwa Nabiullah Ibrahim yang diperintahkan Allah SWT untuk menyembelih puteranya



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syura PKS

"Belajar dari kurban ada masyarakat yang menyediakan ternak atau menjadi peternak, ada penjual, bahkan ada yang sekadar dititipi ternak untuk penggembakan. Ini semua bisa menghasilkan bukan hanya ketahanan tapi kedaulatan pangan,"

Nabiyullah Ismail.

Menurutnya banyak pelajaran penting syariat kurban yang relevan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertama, peristiwa tersebut mengajarkan tentang ujian keimanan dan keikhlasan

seorang hamba untuk mengorbankan sesuatu yang sangat berharga dan dicintainya kepada Sang Kholik Pemilik Cinta yang sesungguhnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Idul Adha 1443 H di Dapil,

# Rafli Salurkan 9 Sapi Qurban

KUTIPAN

Banda Aceh (11/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Aceh Rafli, Salurkan 9 sapi qurban pada perayaan hari raya Idul Adha 1443 hijriyah

disalurkan melalui yasanan Lentera Muda Karya (LEMKA) untuk diserahkan kepada panitia qurban sejumlah masjid dan pesantren yang tersebar di beberapa tempat dalam Provinsi Aceh, kemudian dibagikan ke seluruh komponen masyarakat.

"Alhamdulillah sapi untuk kurban sudah kita salurkan ke panita masjid-masjid dan pesantren, disembelih pada 1,2,3 Zulhijjah. Qurban ini bagian kecil dari pengorbanan kita meneladani kisah dan pelajaran dari Nabi Ibrahim" Ujar Rafli, Ahad (10/07/2022)

Pimpinan Yayasan Lemka Aminullah S.H mengatakan, sembilan sapi senilai 200 juta kami terima dari bapak Rafli dan BUMN Bank Mandiri selaku mitra kerja komisi VI DPR RI.

"Sapi qurban di sembelih oleh petugas-petugas qurban di masjid dan pesantren dalam kabupaten Aceh Besar dan



Banda Aceh," ungkapnya.

Sementara itu terkait penyembelihan hewan qurban di Aceh, komponen masyarakat dan panitia penyelenggara memastikan hewan qurban tersebut terbebas dari wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) dan penyakit lainnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Terkait kesehatan hewan, sapi sapi ini dalam kondisi sehat dan layak qurban. Sudah diperiksa oleh dr Hewan pada Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar," kata Aminullah.

**RAFLI**Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Nanggroe Aceh Darussalam I

Alhamdulillah sapi untuk kurban sudah kita salurkan ke panita masjid-masjid dan pesantren, disembelih pada 1,2,3 Zulhijjah. Qurban ini bagian kecil dari pengorbanan kita meneladani kisah dan pelajaran dari Nabi Ibrahim"

Aksi Tebar 1,5 juta Paket Kurban

## Junaidi Auly Ajak Masyarakat untuk Saling Berbagi

### KUTIPAN

Lampung (12/07) --- Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil Lampung II, Junaidi Auly membagikan paket daging kurban.

Junaidi membagikan 10 ekor sapi dan 5 ekor kambing untuk dibagikan kepada masyarakat yang tersebar di 7 Kabupaten meliputi Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji dan Way Kanan.

Menurut Junaidi, kegiatan berkurban ini merupakan agenda rutin setiap Idul Adha dan juga dalam menyemarakkan aksi tebar 1,5 juta paket kurban yang diinisiasi oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera.

"Alhamdulillah tahun ini kembali berkurban kembali, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Semoga masyarakat lainnya ikut tergerak untuk terus saling berbagi. Berbagi itu sendiri tidak mesti dalam bentuk daging kurban, namun lingkup



hal lainnya juga bisa," kata Junaidi, Lampung, Minggu (10/07/2022).

Pada momentum ini Junaidi Auly juga mengajak warga untuk senantiasa menjaga kerukunan, kebersamaan dan silaturahmi.

"Melalui tebar paket kurban ini semoga dapat meningkatkan semangat berbagi, saling memberi, dan mohon doakan semoga dapat istiqomah untuk bisa berkurban setiap tahunnya", tutup Junaidi.



**Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.**

Anggota Komisi XI DPR RI

"Alhamdulillah tahun ini kembali berkurban kembali, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Semoga masyarakat lainnya ikut tergerak untuk terus saling berbagi. Berbagi itu sendiri tidak mesti dalam bentuk daging kurban, namun lingkup hal lainnya juga bisa"



# Rofik Hananto Tebar Hewan Kurban 11 Sapi dan 43 Kambing di Dapil

## KUTIPAN

Purbalingga (11/07) — Di Hari Raya Idul Adha 1443 H ini, Anggota DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto menebar hewan kurban sebanyak 11 ekor sapi dan 43 ekor kambing di Dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen.

"Acara hari ini salah satu bagian kecil dari rangkaian kegiatan PKS di seluruh Indonesia. Tahun ini PKS melakukan program Tebar 1.500.000 paket kurban," kata Rofik Hananto saat penyembelihan hewan kurban di Rumah Berdaya, Blater, Purbalingga, Senin (11/07).

Rofik menambahkan, pada hari ini dilakukan puncak acara penyembelihan hewan kurban di Kantor DPTP PKS di Jakarta.

"Untuk Dapil Jateng VII juga kita lakukan hari ini. Alhamdulillah tahun ini kita bisa kurban lebih banyak dibandingkan tahun lalu," jelas Rofik.

Hal itu karena adanya dukungan sejumlah perusahaan, seperti Erdigma,



HEW, AEJ. Rofik menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung program tebar 1.500.000 paket kurban, khususnya di Dapil Jateng VII.

Ketua Panitia Fahmi Muhammad Hanif mengatakan, di Idul Adha tahun ini Bapak Rofik Hananto menebar hewan kurban sebanyak 11 ekor sapi dan 43 ekor kambing yang disebarkan di Kabupaten

Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen. Ada 5000 paket lebih dari hewan kurban ini.

"Untuk hari ini kita sembelih 6 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Daging kambing untuk dimakan bersama, sedangkan daging sapi untuk warga sekitar, tim relawan semar dan para karyawan perusahaan. Terima kasih kepada semua yang sudah membantu. Semoga barokah dan mendapat pahala dari Allah," katanya.



**H. ROFIK HANANTO, S.E**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

Pada hari ini dilakukan puncak acara penyembelihan hewan kurban di Kantor DPTP PKS di Jakarta. Untuk Dapil Jateng VII juga kita lakukan hari ini. Alhamdulillah tahun ini kita bisa kurban lebih banyak dibandingkan tahun lalu



# Khutbah Iedul Adha, Fikri: Bangun Peradaban Damai dengan Spiritualitas, Persatuan dan Keadilan

## KUTIPAN

Tegal (11/07) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS asal daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Tegal, serta Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Abdul Fikri Faqih diberi kesempatan mengisi khutbah Iedul Adha 1443 H di Lapangan perumahan kartini Slawi, Kabupaten Tegal ahad (10/07/2022).

"Hari ini kita mengingat kembali khutbah Rasulullah SAW dalam peristiwa haji wada (haji terakhir beliau) pada tahun ke-10 Hijrah, yakni tentang membangun peradaban dengan spiritualitas, persatuan, dan keadilan," kata Fikri di depan ratusan jamaah sholat Ied.

Fikri berujar, pada sesi pertama khutbahnya, Rasulullah mengingatkan kepada jamaah, tidak selamanya mereka akan selalu bersama Rasul. Bahkan, beliau mengisyaratkan bahwa jangankan tahun depan sudah tak berjumpa lagi dengannya di

Arofah, maka Rasul mengingatkan supaya jamaah mendengarkan dengan seksama.

"Pelajarannya adalah tidak ada yang bisa menjamin apakah kita yang hadir pada hari ini dan di tempat ini, bakal menemui Iedul Adha akan datang kembali," imbuh Fikri.

Khutbah Rasul tersebut, menurut Riwayat para ulama, didengar oleh seratus ribuan orang jamaah haji tanpa pengeras suara dari shaf terdepan hingga jamaah paling ujung.

"Betapa para sahabat juga sangat mendengarkan de-

ngan cermat isi khutbah Rasul."

Fikri mengingatkan, bahwa andai tahun depan tak bisa berjumpa dengan Iedul Adha lagi, sudahkah kita siap menghadap Tuhan, sang Rabbul Izzati?

"Kalau belum, maka sepulangnya dari sini, setiap pekerjaan kita, perjalanan kita, ucapan dan tindakan atau tingkah laku kita mari kita siapkan dalam rangka menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa," katanya.

Menurut Fikri mentalitas bahwa apa yang kita kerjakan sekarang adalah guna mempersiapkan kehidupan setelah kematian kita itu disebut dengan semangat spiritualitas yang sesungguhnya untuk membangun peradaban yang berkelanjutan.

Fikri juga mengangkat pesan Rasul yang sangat monumental. "Para ulama bersepakat bahwa haram kita bertengkar, berseteru, apalagi sampai menumpahkan darah," imbuhnya.

Selengkapnya kunjungqgfraksi.pks.id



**Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

"Mentalitas bahwa apa yang kita kerjakan sekarang adalah guna mempersiapkan kehidupan setelah kematian kita itu disebut dengan semangat spiritualitas yang sesungguhnya untuk membangun peradaban yang berkelanjutan"

# Sukseskan Program 1,5 Juta Paket, PKS Pandeglang Salurkan Ribuan Paket Qurban

## KUTIPAN

Kabupaten Pandeglang (11/07) --- DPD PKS Kabupaten Pandeglang menggelar Program Nasional PKS Tebar 1,5 Juta Paket Qurban sesuai arahan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri beberapa waktu.

Dalam program tersebut DPD PKS Pandeglang telah berkontribusi sebanyak 17 ekor sapi, satu kerbau dan 25 ekor kambing dengan target penerima manfaat sebanyak 3100 orang. Sementara kegiatan pemotongan dihadiri langsung Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dr. Dimiyati Natakusumah di lapangan parkir DPD PKS Pandeglang pada hari pertama Idul Adha, Ahad (10/07/2022).

Pada kesempatan tersebut Dimiyati Natakusumah mengemukakan Program Tebar 1,5 Juta Paket Qurban merupakan upaya PKS untuk membantu masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Pandeglang.



"Alhamdulillah kami bisa berkontribusi dalam program PKS ini, semoga dapat memberikan keberkahan, kemuliaan dan bermanfaat tentunya bagi masyarakat Pandeglang," katanya.

Ketua DPD PKS Pandeglang Tb. Asep Rafie menjelaskan, PKS Pandeglang telah melaksanakan arahan dari Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Habib Salim Segaf Aljufri

dalam program menebar 1,5 juta paket qurban untuk Indonesia.

"Daging hewan qurban kami bagikan kepada masyarakat, simpatisan serta kader PKS di Pandeglang. Ini adalah bentuk kepedulian kami dan pengorbanan dari para kader dan Asep PKS. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS." kata Tb. Asep yang juga Wakil Ketua DPRD Pandeglang itu.

ementara itu Sekretaris DPD PKS Pandeglang H. Hasan Afifi mengatakan daging qurban disebar ke enam dapil yang ada di wilayah Pandeglang dengan tujuan agar lebih merata dirasakan oleh masyarakat, struktur, kader dan simpatisan.

"kita ingin setiap umat Muslim ikut berqurban, masih banyak warga sekitar kita yang masih jarang sekali makan daging, mudah mudahan dengan program Tebar 1,5 jt Paket qurban ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya.



**DR. H. R. A. DIMYATI  
NATAKUSUMAH, SH, MH**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten I

"Alhamdulillah kami bisa berkontribusi dalam program PKS ini, semoga dapat memberikan keberkahan, kemuliaan dan bermanfaat tentunya bagi masyarakat Pandeglang"



PERSEMBAHAN  
FRAKSI PKS DPR RI  
DALAM RANGKA  
HUT RI KE 77

DIRGAHAYU  
REPUBLIK INDONESIA



PULIH  
LEBIH CEPAT  
BANGKIT  
LEBIH KUAT

SEASON 5

LOMBA BACA TEKS   
*Proklamasi*  
MIRIP SUARA PRESIDEN  
SOEKARNO 2022



Tema : Proklamasi Keadilan dan Sejahtera:  
Saatnya Anak Muda Jadi Proklamator



**Dr. Salim**  
Ketua Majelis Syura PKS

★ Total Hadiah

**RP 17 JUTA**



Ketentuan Selengkapnya  
**Scan QR**



**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

# Launching Lomba Baca Teks Proklamasi Fraksi PKS DPR, Dr. Salim Berharap Pemuda Jadi Proklamator Masa Kini

## KUTIPAN

Jakarta (22/07) - Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Presiden Soekarno Fraksi PKS DPR RI kembali digelar tahun ini. Kegiatan launching dilaksanakan di kediaman Habib Dr. Salim Segaf Al Jufri, Ketua Majelis Syuro PKS (Jum'at, 22/7/2022).

Acara yang diselenggarakan secara hybrid ini mengangkat tema "Proklamasi Keadilan Sejahtera : Saatnya Anak Muda Menjadi Proklamator", dimoderatori oleh artis sekaligus komedian Narji dan dihadiri langsung oleh Dr. Salim sebagai pembicara kunci didampingi Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini dan Ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan, dr. Gamal Albinsaid. Hadir juga tamu kehormatan Timnas Sepakbola Amputasi Indonesia, PKS Muda, Gema Keadilan, dan Garuda Keadilan.

Secara khusus bersamaan dengan acara ini Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada



Timnas Sepakbola Amputasi Indonesia yang lolos piala dunia sepakbola amputasi yang akan digelar di Turki tahun 2022 ini. Fraksi PKS berkomitmen akan terus memberikan dukungan moril maupun materiel sebagaimana dukungan ketika mereka bertanding pada kualifikasi di Bangladesh beberapa waktu

yang lalu. "Mereka inspirasi bagi anak muda seluruh Indonesia. Kita bangga."

Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Salim Segaf Aljufri mengatakan anak muda punya peran luar biasa. Mulai dari kebangkitan nasional, sumpah pemuda hingga kemerdekaan digagas oleh pemuda, sehingga negeri ini dapat keluar dari penjajahan. Anak muda diharapkan mampu menjadi proklamator masa kini.

Menteri Sosial 2009-2014 ini mengajak anak muda Indonesia bangkit mengejar ketertinggalan. Katanya, negara dengan keterbatasan sumber daya alam justru banyak yang sukses, seperti Korea Selatan. Dr. Salim, imbuhnya, yakin bahwa anak muda Indonesia juga mampu mewujudkan cita-cita bangsa, terlebih sumber daya alam dan manusia negeri ini sangat berlimpah.

Pada setiap perkataannya, Dr. Salim senantiasa menanamkan optimisme kepada anak muda, terutama untuk menempati posisi kepemimpinan. Dr. Salim mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syuro PKS

"Anak muda adalah harapan Indonesia masa depan. "47 persen pemilih (dalam pemilu) adalah pemilih muda, berarti ada sekitar 75 juta pemilih muda. Banyaknya pemilih muda adalah hal baik bagi masa depan bangsa ini"

mampu menyatukan anak bangsa dan memosisikan diri selayaknya ayah. Seorang ayah akan selalu sayang kepada anak-anaknya.

Menurut Dr. Salim anak muda adalah harapan Indonesia masa depan. "47

persen pemilih (dalam pemilu) adalah pemilih muda, berarti ada sekitar 75 juta pemilih muda. Banyaknya pemilih muda adalah hal baik bagi masa depan bangsa ini," pungkasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

## EVENT

fraksi.pks.id | Jumat 22 Juli 2022

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



# Launching Lomba Baca Teks Proklamasi, Dr Salim Ingatkan Pemuda untuk Mengukir Sejarah Positif

## KUTIPAN

Jakarta (22/07) - Launching Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Soekarno kembali digelar tahun ini. Kegiatan dilaksanakan di kediaman Habib Dr Salim Segaf Al Jufri, Ketua Majelis Syuro PKS, tepatnya di Pejaten Residence, Jakarta.

Acara yang diselenggarakan secara hybrid ini dihadiri langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, Ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan, dr. Gamal Albinsaid, perwakilan tim Sepakbola Amputasi Indonesia, perwakilan PKS Muda, perwakilan Garuda Keadilan dan sejumlah kader.

Dr Salim, selaku pembicara kunci, mengungkapkan bahwa anak muda punya peran luar bisa. Kemerdekaan, ujunya, digagas oleh pemuda, sehingga negeri ini dapat keluar dari penjajahan. Anak muda diharapkan mampu menjadi proklamator masa kini.



Negara dengan keterbatasan Sumber Daya Alam justru banyak yang sukses, seperti Korea Selatan. Dr Salim, imbuhnya, yakin bahwa anak muda Indonesia juga mampu mewujudkan cita-

cita bangsa, terlebih SDA negeri ini sangat berlimpah.

Pada setiap perkataannya, Dr Salim senantiasa menanamkan optimisme kepada anak muda, terutama untuk menempati posisi pemimpin.

Dr Salim mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus mampu menyatukan anak bangsa dan memposisikan diri selayaknya ayah (sosok penyayang anak).

"47 persen memilih (dalam pemilu) adalah pemilih muda, berarti ada sekitar 75 juta pemilih muda. Banyaknya pemilih muda adalah hal baik bagi masa depan bangsa ini," pungkasnya.



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syuro PKS

"Seorang pemimpin harus mampu menyatukan anak bangsa dan memposisikan diri selayaknya ayah (sosok penyayang anak). 47 persen memilih (dalam pemilu) adalah pemilih muda, berarti ada sekitar 75 juta pemilih muda. Banyaknya pemilih muda adalah hal baik bagi masa depan bangsa ini"





# Launching Lomba Baca Teks Proklamasi, **Ketua FPKS: Bangkitkan Semangat Kebangsaan Generasi Muda**

## KUTIPAN

Jakarta (22/07) --- Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini bersama Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS memberikan sambutan dalam acara launching lomba baca teks proklamasi mirip suara Soekarno season 5 tahun 2022,

yang diselenggarakan di rumah pemenang Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Salim Seggaf Al Jufri, di Pejaten bilangan Jakarta Selatan.

Mengawali sambutannya, Jazuli mengucapkan apresiasi atas Kinerja Fraksi PKS dalam membangkitkan semangat kebangsaan melalui penyelenggaraan lomba ini.

"Lomba ini di buat dengan tujuan, kita ingin anak muda biasa dengan cerminan tokoh proklamator. Dulu di saat proklamasi, bung Karno dan bung Hatta juga menghabiskan masa muda nya dengan sikap nasionalisme dengan dorongan tokoh senior agar bisa mencapai kemerdekaan. Sehingga dengan semangat



perjuangan mereka, kita ingin semangat anak muda Indonesia yang punya kreativitas dan talenta kiranya bisa bergabung di dalamnya lomba ini. Sebab dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini anak muda justru jangan mudah terlena sehinga tidak sempat memanfaatkan potensinya".

## Ungkapnya

Anggota Komisi I DPR RI ini juga memaparkan peran penting pemuda bangsa yang diharapkan bisa menjadi tonggak harapan bangsa. Dengan trend anak muda di masa ini, menjadi pertanyaan besar apakah mereka masih ingat bahwa mereka lah yang akan menjadi penerus tongkat estafet bangsa ? atau justru lupa akan tugas dan peran tersebut. Sehingga anggora DPR dari dapil Banten II ini jelas menuturkan peran Soekarno dan bung Hatta patut diteladani.

Terakhir, Jazuli mengatakan bahwa dengan launching lomba baca teks proklamasi mirip suara soekarno ini semoga bisa membangkitkan semangat dan minat muda terhadap jejak perjuangan pendiri bangsa dan harapannya kegiatan seperti ini dapat diteruskan ditahun yang akan datang dengan inovasi dan perkembangan teknologi.

"Mari kita sukseskan lomba ini, seraya membangun talenta anak muda dengan beragam kreativitasnya. Dan



**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Mari kita sukseskan lomba ini, seraya membangun talenta anak muda dengan beragam kreativitasnya. Dan tentu apresiasi besar juga saya sampaikan kepada panitia fraksi atas penyelenggaraan lomba yang sudah terselenggara di tahun ke lima dan semoga terus terselenggara di tahun yang akan datang"

tentu apresiasi besar juga saya sampaikan kepada panitia fraksi atas penyelenggaraan lomba yang sudah

terselenggara di tahun ke lima dan semoga terus terselenggara di tahun yang akan datang"  
Tutup Ketua Fraksi PKS DPR RI.



PERSEMBAHAN  
FRAKSI PKS DPR RI  
DALAM RANGKA  
HUT RI KE 777

SEASON 5  
**LOMBA BACA TEKS**  
*Proklamasi*  
MIRIP SUARA PRESIDEN  
SOEKARNO 2022



PULIH  
LEBIH CEPAT  
BANGKIT  
LEBIH KUAT

## BERITA FOTO



### Launching Lomba Baca Teks Proklamasi

Jakarta (22/07) - Launching Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Soekarno kembali digelar tahun ini. Kegiatan dilaksanakan di kediaman Habib Dr Salim Segaf Al Jufri, Ketua

Majelis Syuro PKS, tepatnya di Pejaten Residence, Jakarta.

Acara yang diselenggarakan secara hybrid ini dihadiri langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazulii Juwaini,

Ketua DPPK PKS Bidang Kepemudaan, dr. Gamal Albinsaid, perwakilan tim Sepakbola Amputasi Indonesia, perwakilan PKS Muda, perwakilan Garuda Keadilan dan sejumlah kader.

# HNW Wakili Indonesia Kuatkan Kerjasama dengan Pembentukan Forum MPR se-Dunia di Maroko

## KUTIPAN

Maroko (20/07) --- Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid bersama Wakil Ketua MPR RI lainnya Fadel Muhammad Al-Haddar bertemu dengan Rachid Talbi El Alami selaku Ketua Majelis Al-Nuwwab (setingkat DPR di Kerajaan Maroko),

yang kemudian bertemu Mohamed Hanine selaku Wakil Ketua Majelis Al-Mustasyarin di Gedung Parlemen Maroko, hari Senin (18/07/2022) waktu setempat.

Kehadiran Hidayat dan Fadel Muhammad merupakan delegasi utusan MPR RI untuk menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya antara Ketua MPR RI dengan Ketua Majelis Al-Mustasyarin Maroko terkait prakarsa MPR RI untuk pembentukan Forum Majelis Syura atau Forum MPR se-Dunia.

Di awal pertemuan, Wakil Ketua Majelis Al-Mustasyarin

menyampaikan salam dari Ketua Majelis Al-Mustasyarin yang tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan tugas keparlemen di luar Maroko, dan Wakil Ketua menyatakan bahwa Ketua Majelis Al-Mustasyarin sangat mendukung prakarsa dari MPR tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Hidayat yang akrab dipanggil HNW menyampaikan terimakasih atas sambutan hangat dari Parlemen Maroko dan kerjasama yg sudah dilakukan selama ini.

Pembahasan utama yang disampaikan HNW dihadapan para pimpinan parlemen Maroko ialah realisasi usulan

pembentukan Forum Majelis Syura atau Forum MPR se-Dunia beserta tanggapan positif negara-negara sahabat Indonesia atas ide tersebut, seperti dukungan dari Raja Arab Saudi dan Majelis Syura Arab Saudi, serta para pimpinan parlemen di Turki, Iran, dan sejumlah negara lainnya.

HNW menyebutkan bahwa faktor penting pembentukan Forum Majelis Syura atau Forum MPR se-Dunia diantaranya adalah konsolidasi anggota maupun lembaga-lembaga MPR maupun yang sedang melaksanakan tugas belum terakomodasi dalam berbagai Organisasi Parlemen seperti IPU, PUIC dan lainnya, agar bisa bersama dengan lembaga-lembaga MPR dan sejenisnya dapat menguatkan forum-forum yang ada.





**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**  
Wakil Ketua MPR RI

“Ide Majelis Syura atau Majelis Permusyawaratan se-Dunia sudah didukung sejak 2019 oleh Majelis Permusyawaratan Maroko dan Majelis Syura Saudi dan sudah diselenggarakan seminar nasional dan kajian terkait ide itu, tetapi realisasinya tertunda karena Covid-19, insya Allah realisasinya akan dilaksanakan di Oktober 2022 di kota Bandung sebagai kota sejarah KTT Asia Afrika bersamaan presidensi Indonesia di G20



**Kunjungi  
Kanal Resmi  
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)
-  Instagram  
[fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)
-  Twitter  
[@fraksipksdprri](https://twitter.com/fraksipksdprri)
-  Facebook  
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/fraksi.pks.dpr.ri)
-  Youtube  
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/playlist?list=PLKSTV DPR RI)

***Nantikan  
Setiap Pekan***